



DIREKTORAT JENDRAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



# RENCANA KERJA TAHUNAN **2020**



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# RENCANA KERJA TAHUNAN **2020**

# RENCANA KERJA TAHUNAN 2020



## TIM PENYUSUN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

### PELINDUNG

Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA  
(Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

### PENGARAH

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

### PENANGGUNG JAWAB

Diyana Wahyudi, ST, ME  
(Kepala Bagian Rencana dan Laporan)

### EDITOR

Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT  
(Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana dan Program)

### TIM PENYUSUN

Gofar, Tri Sudharma, Dieta Patik, Sarah Alsa, Koesnobroto,  
Mirza Aditya, Mochamad Imron, Wahyunengsih, Elda Fitri  
Hasari, Alfin Ali.

## SAMBUTAN

Oleh **Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Peran serta sub sektor migas dalam mencapai daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dimana sub sektor migas merupakan penghasil devisa maupun sumber penerimaan negara. Diharapkan penerimaan Negara dari sub sektor migas dapat tercapai di tahun 2020.

Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accesibility, affordability, Acceptability, dan Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) sehingga diharapkan pada tahun 2020 nanti, Ditjen Migas dapat merealisasikan Indikator Kinerja yang sudah disusun demi terwujudnya Ketahanan Migas.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 diantaranya:

1. Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional dan Non Konvensional yang Ditawarkan;
2. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
3. Konversi Minyak Tanah ke LPG;
4. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan dan Petani;
5. Layanan Verifikasi dan pengawasan Implementasi Mandatori pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga
6. Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak *Grass Root* dan *Refinery Development Master Plan (RDMP)*;

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat bersatu padu mengembangkan sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan peran Kementerian ESDM untuk mewujudkan energi yang berkeadilan.

Jakarta, Januari 2020

**Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA**

SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR TABEL	7
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	9
1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)	9
1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)	10
1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS	12
<b>2. EVALUASI KEGIATAN 2014-2019</b>	<b>14</b>
2.1 LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI	15
2.2 JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI	16
2.3 CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	19
2.4 PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI	22
2.5 VOLUME BBM BERSUBSIDI	25
2.6 VOLUME LPG BERSUBSIDI	26
2.7 KAPASITAS KILANG BBM	27
2.8 KAPASITAS TERPASANG KILANG LPG	28
2.9 PEMBANGUNAN JARINGAN GAS RUMAH TANGGA	29
2.10 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA BAHAN BAKAR GAS (KERJA SAMA PEMBANGUNAN SPBG DENGAN NEDO)	31
2.11 JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN	32
2.12 INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI	33
2.13 JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK	34
2.14 JUMLAH PERUSAHAAN HULU DAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL	35
<b>3. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020</b>	<b>38</b>
3.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	39
3.2 INDEKS KETERJANGKAUAN MIGAS	41
3.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	42

3.4	TINGKAT PENERIMAAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PRODUK MIGAS	44
3.5	INDEKS PENGELOLAAN ENERGI MIGAS	45
3.6	INDEKS KESELAMATAN MIGAS	45
3.7	INDEKS PENGENDALIAN DAN PELAYANAN	47
<b>4.</b>	<b>ANGGARAN DITJEN MIGAS</b>	<b>48</b>
<b>5.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)</b>	<b>52</b>
5.1	IKK DAN IKO DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM (DMB)	53
5.1.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	53
5.1.2	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	54
5.2	IKK DAN IKO DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR (DMO)	54
5.2.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	55
5.2.2	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	56
5.3	IKK DAN IKO DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU (DME)	58
5.3.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	58
5.3.2	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	59
5.4	IKK DAN IKO DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN (DMT)	60
5.4.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	60
5.4.2	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	61
5.5	IKK DAN IKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL (SDM)	62
5.5.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	62
5.5.2	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	63
5.6	IKK DAN IKO DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DMI)	64
5.6.1.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	64
5.6.2.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (IKO)	65
<b>6.</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	ARAH PRIORITAS KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025	10
GAMBAR 2.	TEMA PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2018-2020	11
GAMBAR 3.	PETA STRATEGI DITJEN MIGAS 2020-2024	13
GAMBAR 4.	PETA DISTRIBUSI HIDROKARBON INDONESIA	18
GAMBAR 5.	RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU JIPE – KABUPATEN GRESIK	24
GAMBAR 6.	TOTAL REALISASI PEMBANGUNAN JARGAS APBN TAHUN 2019 : 74.496 SR (16 LOKASI)	29

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.	LIFTING MINYAK BUMI TAHUN 2014-2019	15
GRAFIK 2.	LIFTING GAS BUMI TAHUN 2014-2019	16
GRAFIK 3.	STATISTIK WK MIGAS KONVENSIONAL 2012-2019	17
GRAFIK 4.	JUMLAH KEGIATAN STUDI BERSAMA, PENAWARAN WK, DAN TANDATANGAN KKS	17
GRAFIK 5.	CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA	19
GRAFIK 6.	TARGET DAN REALISASI CADANGAN MINYAK BUMI	19
GRAFIK 7.	CADANGAN GAS BUMI INDONESIA	20
GRAFIK 8.	TARGET DAN REALISASI CADANGAN GAS BUMI INDONESIA	21
GRAFIK 9.	PERSENTASE ALOKASI GAS BUMI DOMESTIK	22
GRAFIK 10.	PEMANFAATAN GAS BUMI INDONESIA 2019	23
GRAFIK 11.	VOLUME TARGET DAN REALISASI BBM SUBSID 2015-2019	25
GRAFIK 12.	VOLUME TARGET DAN REALISASI LPG BERSUBSIDI 2015-2019	26
GRAFIK 13.	PRODUKSI BBM DARI KILANG DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019	27
GRAFIK 14.	KAPASITAS KILANG LPG PERIODE 2015-2019	28
GRAFIK 15.	REALISASI PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA APBN TA 2009-2019	31
GRAFIK 16.	TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA SEKTOR MIGAS 2014-2019	32
GRAFIK 17.	REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS TAHUN 2014 – 2019	33
GRAFIK 18.	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK 2015-2019	35
GRAFIK 19.	JUMLAH KECELAKAAN DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	35
GRAFIK 20.	JUMLAH PERUSAHAN HULU MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL	36
GRAFIK 21.	JUMLAH PERUSAHAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL	36
GRAFIK 22.	JUMLAH KECELAKAAN DALAM KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	37
GRAFIK 23.	PAGU ANGGARAN DITJEN MIGAS PERIODE 2014-2019	49
GRAFIK 24.	REALISASI ANGGARAN DITJEN MIGAS 2014-2019	50
GRAFIK 25.	ALOKASI ANGGARAN DITJEN MIGAS TAHUN 2020	50
GRAFIK 26.	BELANJA ANGGARAN TA 2020	31

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.	REALISASI JENIS BBM TERTENTU (BBM SUBSIDI) TAHUN 2019	26
TABEL 2.	KAPASITAS KILANG BBM NASIONAL	28
TABEL 3.	PROGRES KEGIATAN JARGAS SAMPAI DENGAN AKHIR 2019	30
TABEL 4.	TANTANGAN DAN SOLUSI INVESTASI HULU DAN HILIR MIGAS	34
TABEL 5.	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN MIGAS TAHUN 2020	39
TABEL 6.	ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING ESELON 2	51
TABEL 7.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DMB	53
TABEL 8.	IKO SUB DIREKTORAT DI DMB	54
TABEL 9.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DMO	55
TABEL 10.	IKO SUB DIREKTORAT DI DMO	56
TABEL 11.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DME	58
TABEL 12.	IKO SUB DIREKTORAT DI DME	59
TABEL 13.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DMT	60
TABEL 14.	IKO SUB DIREKTORAT DI DMT	61
TABEL 15.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SDM	62
TABEL 16.	IKO MASING-MASING BAGIAN DI SDM	63
TABEL 17.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DMI	64
TABEL 18.	IKO SUB DIREKTORAT DI DMI	65





1

## PENDAHULUAN

RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2020**

### 1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya mengamankan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Termasuk didalamnya tertuang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan

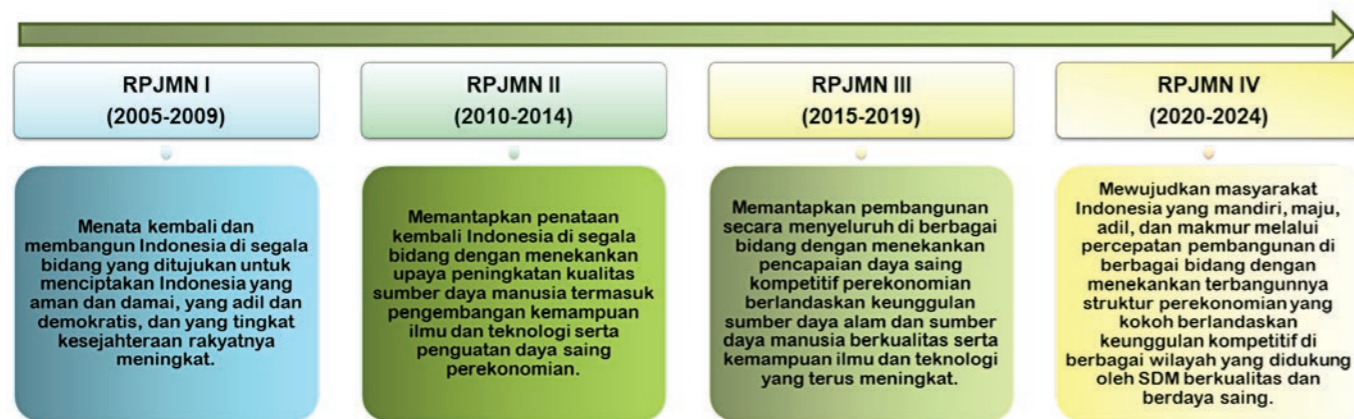
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Berdasarkan RPJPN 2005-2025 bahwa tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan. Sedangkan visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan; untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

### 1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. RPJPN 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN. RPJMN Tahap I (2004-2009)

dan tahap II (2010-2014) telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2025) akan dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih (2020-2025). Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan RPJPN 2005-2025.



Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: **Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**. RPJMN 2020-2024 memiliki 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional) yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 agenda pembangunan tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada agenda pembangunan ke-1 dan ke-5. Pada agenda pembangunan pertama, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan

merata. Sedangkan pada agenda pembangunan kelima bahwa Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah tersebut, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada level Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Sejalan dengan itu, pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa RPJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ABPN dan acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. RKP Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Tema yang diusung pada RKP tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024, pelaksanaan RKP tahun 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan tema pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM, maka seluruh sektor pembangunan termasuk pada sektor riil akan difokuskan pada pengembangan SDM.



Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018

Sesuai dengan visi pembangunan, "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**", RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Sehingga program-

program pembangunan akan ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut. Di tingkat Eselon I, untuk menjelaskan program yang tertera pada Renstra-KL diperlukan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 yang merupakan penjabaran tahun pertama dalam RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan Visi dan Misi presiden serta evaluasi Pelaksanaan Renstra 2015-2019. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan.

### 1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu balance scorecard (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya, Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan / organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan "sistem imbalan". BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dlm organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan sehingga organisasi dapat berjalan

dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi pemerintah perspektif keuangan diganti dengan stakeholder perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai merupakan peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energy dan ketahanan energy nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ditjen Migas memiliki 5 sasaran program yang diintegrasikan dengan 4 perspektif BSC, yaitu:

1. Terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan
2. Meningkatnya Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Migas
3. Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi
4. Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan
5. Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas.



Gambar 3. Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program (*outcome*) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program. Capaian Sasaran Program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

Mengacu pada World Energy Council (WEC) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), terdapat 5 indikator terwujudnya ketahanan energi, yaitu ketersediaan (*availability*), kemudahan (*accessibility*),

keterjangkauan (*affordability*), masyarakat (*acceptability*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu Renstra Ditjen Migas 2020-24 juga fokus pada penataan dan penguatan internal organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, penataan peraturan perundangan, peningkatan kualitas layanan publik, yang terangkum dalam Reformasi Birokrasi (terdapat 8 area perubahan sesuai dengan Permen PAN RB 11/2015). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah sebuah konsep Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yang terdiri dari 5 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Utama.

## EVALUASI



# 2 EVALUASI 2014-2019

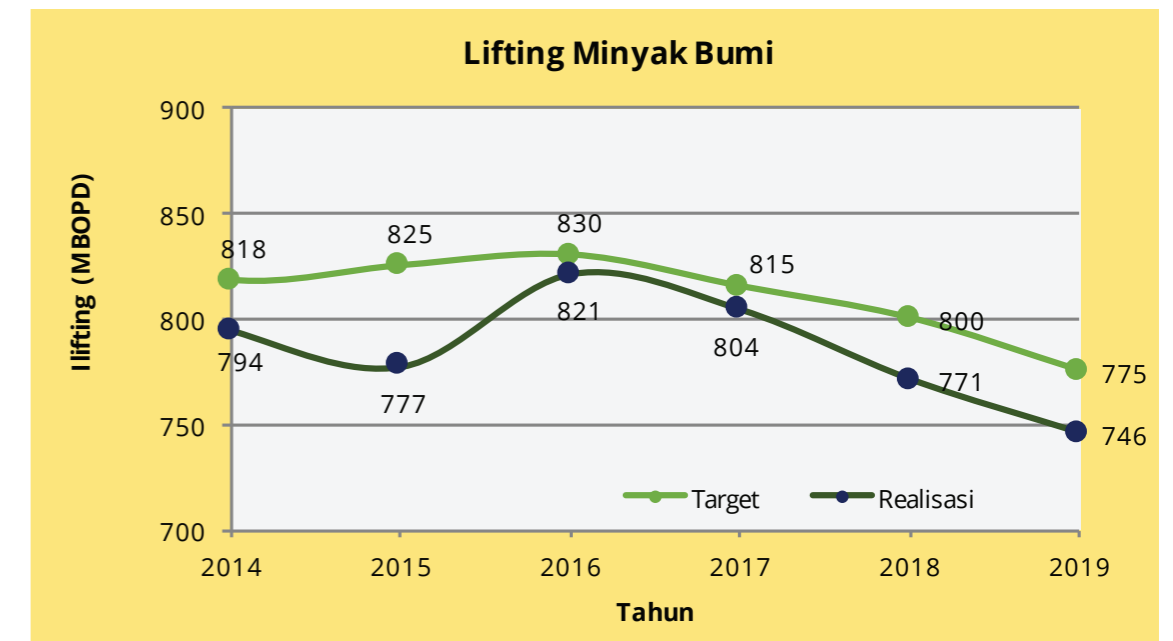
RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2020**

## 2.1 LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

### a. Volume *Lifting* Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 1 perkembangan *lifting* minyak bumi dari tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan akhir semester 1 tahun 2019 realisasi *lifting* minyak bumi sebesar 745,61 Ribu BOPD dari angka yang di targetkan berdasarkan APBN 2019 sebesar 775 Ribu BOPD. Perubahan target *lifting* beberapa tahun ini bisa diakibatkan oleh perkembangan ekonomi

domestik dan global beserta proyeksi kedepan. Sedangkan penurunan *lifting* secara teknis karena produksi migas secara umum mengalami penurunan *performance reservoir* secara alami (*natural decline*) dan juga belum ditemukan cadangan minyak besar yang dapat menggantikan produksi minyak yang terus menurun beserta kendala teknis lainnya di sumur

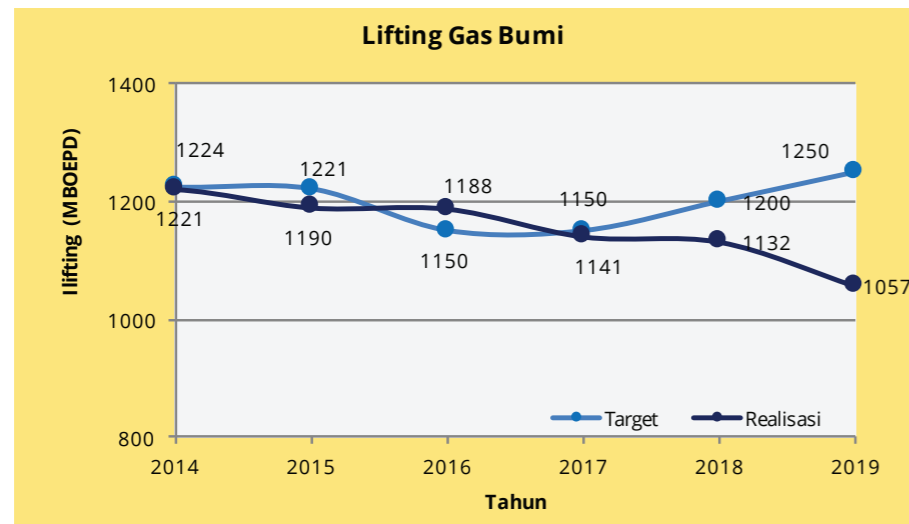


Grafik 1. *Lifting* Minyak Bumi Tahun 2014-2019

### b. Volume *Lifting* Gas Bumi (MBOEPD)

Pada Grafik 2 berikut menunjukkan perkembangan besaran *lifting* gas bumi selama periode 6 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Seperti halnya *lifting* minyak bumi, kecenderungan *lifting* gas bumi mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun 2019. Data sampai dengan akhir semester 2 tahun 2019 menunjukkan realisasi *lifting* gas bumi sebesar 1.057 MBOEPD (capaian 85%) dari target

yang ditetapkan sesuai APBN 2019 sebesar 1.250 MBOEPD. Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir realisasi *lifting* gas bumi mengalami penurunan karena minimnya penemuan cadangan baru untuk meningkatkan produksi migas beserta kendala teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi sumur beserta reservoirnya.



Grafik 2. Lifting Gas Bumi Tahun 2014-2019

## 2.2 JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

### a. Wilayah Kerja (WK) Konvensional

Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional melalui lelang wilayah kerja selama periode 2014-2016 mengalami kecenderungan trend yang menurun sebagaimana terlihat pada Grafik 3. Penurunan trend tersebut disebabkan oleh semakin terbatasnya prospektif area yang ditawarkan serta kecenderungan penurunan minat investasi perusahaan migas karena harga minyak mentah dunia dan faktor terms & conditions yang diberikan. Namun pada tahun 2017 penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional mulai mengalami kenaikan trend dengan mulai diterapkan sistem Kontrak Gross Split. Pada tahun 2019, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan jumlah penawaran sebanyak 13 wilayah

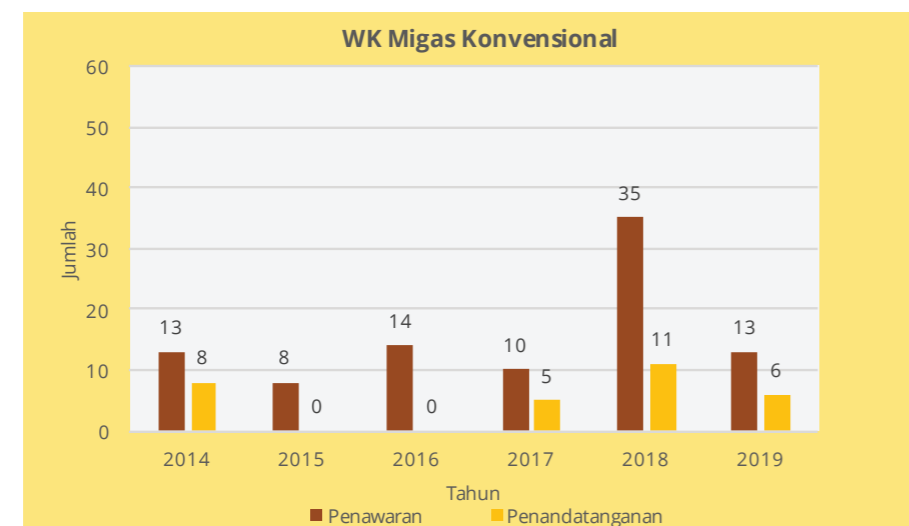
kerja yang keseluruhannya ditawarkan melalui Lelang Reguler yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

**Tahap 1 :** 5 WK yang terdiri dari WK Selat Panjang, West Kampar, Anambas, West Ganal, West Kaimana. Seluruh WK ini ditawarkan dengan mekanisme Kontrak PSC Gross Split

**Tahap 2 :** 4 WK yang terdiri dari WK West Kampar, Bone, Kutai, West Ganal

**Tahap 3 :** 4 WK yang terdiri dari WK East Gebang, West Tanjung I, Belayan I, Cenderawasih VIII.

Berikut grafik 3 menunjukkan perkembangan penawaran dan penandatanganan WK selama kurun waktu 6 tahun terakhir



Grafik 3. Statistik WK Migas Konvensional 2012-2019

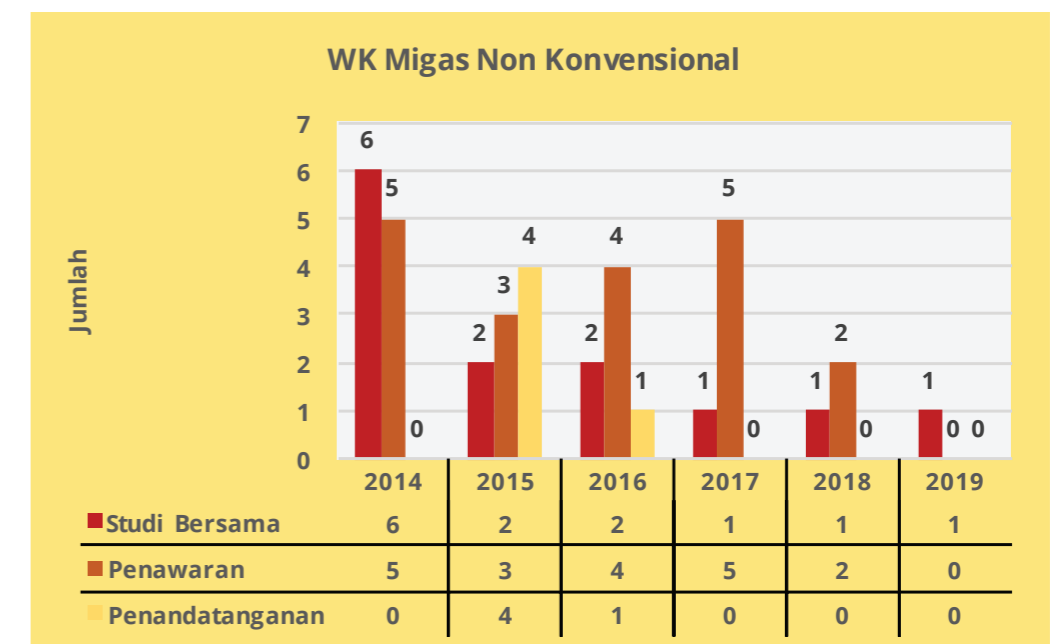
Selama tahun 2019, penandatanganan Kontrak Kerjasama (KKS) Migas yang telah dilakukan sebanyak 6 WK Migas. Hasil ini bisa dikatakan sangat baik mengingat keberhasilan penandatanganan KKS Migas ini tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara

atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan persiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

### b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Pengembangan Migas Non Konvensional di Indonesia dimulai pada tanggal 27 Mei 2008 dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama Gas Metana Batubara pertama. Dan kemudian bertambah hingga 54 wilayah kerja sampai dengan 2012 dan kemudian dilanjutkan oleh pengembangan Shale Gas yang ditandai dengan penandatanganan WK

Migas Non Konvensional (Shale Gas) mulai 31 Januari 2013. Hingga tahun 2019 terdapat enam wilayah WK Migas Non Konvensional (Shale Gas) yang telah berjalan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cadangan migas nasional yang sudah mulai mengalami penurunan.



Grafik 4. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatangan KKS

Terdapat dua isu utama tentang pengembangan migas non konvensional, isu pertama untuk Gas Metana Batubara adalah bagaimana gas metana batubara dapat berproduksi secara komersial. Sudah terdapat beberapa wilayah kerja yang sudah melakukan tes produksi dan menunjukkan adanya potensi gas metana batubara. Untuk selanjutnya peran pemerintah untuk membantu para investor tersebut untuk mempermudah kontraktor sehingga potensi gas metana batubara tersebut bisa diproduksi secara ekonomis.

Isu yang kedua adalah untuk migas non konvensional khususnya shale hidrokarbon, di mana untuk eksplorasi hanya terdapat 6 wilayah kerja aktif, sehingga masih belum terbuktinya potensi migas non konvensional di Indonesia meskipun sumber dayanya yang cukup besar. Beberapa masalah antara lain perbedaan sifat fisik batuan shale yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri yang sudah berproduksi.



Gambar 4. Peta Distribusi Hidrokarbon Indonesia

Beberapa progres yang dikerjakan dalam pengembangan wilayah kerja migas non konvensional akan dilakukan penyempurnaan baik dalam penyiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga *terms & conditions* dan bentuk kontrak yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dari upaya tersebut dapat membantu pencapaian target berupa penandatanganan 2 (dua) KKS Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk perbaikan tersebut masih belum menarik investor dengan

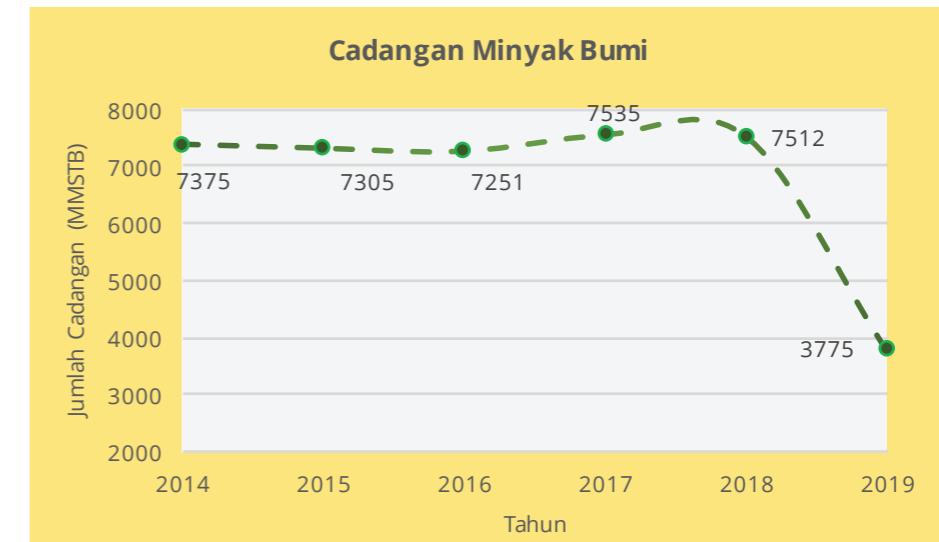
dibuktikan tidak terdapatnya lagi Usulan Penawaran Langsung melalui Studi bersama. Sehingga Pada tahun 2019 sesuai Arahan Presiden untuk terus menyederhanakan Peraturan, Saat ini terkait Pengusahaan Migas Non Konvensional dalam Proses pembahasan Pengusahaan Migas Non Konvensional dapat dilakukan bersamaan di dalam WK Migas (Konvensional) Eksisting dalam satu kontrak, sehingga untuk Lelang WK Migas Non konvensional ditunda sampai Proses Pembahasan selesai dilakukan.

## 2.3 CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

### c. Cadangan Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 5, cadangan minyak Indonesia (termasuk kondensat) terus mengalami penurunan seiring dengan minimnya penemuan cadangan baru sampai dengan tahun 2016. Sementara Tahun 2017 terjadi peningkatan cadangan, tercatat total cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.535 MMSTB dengan

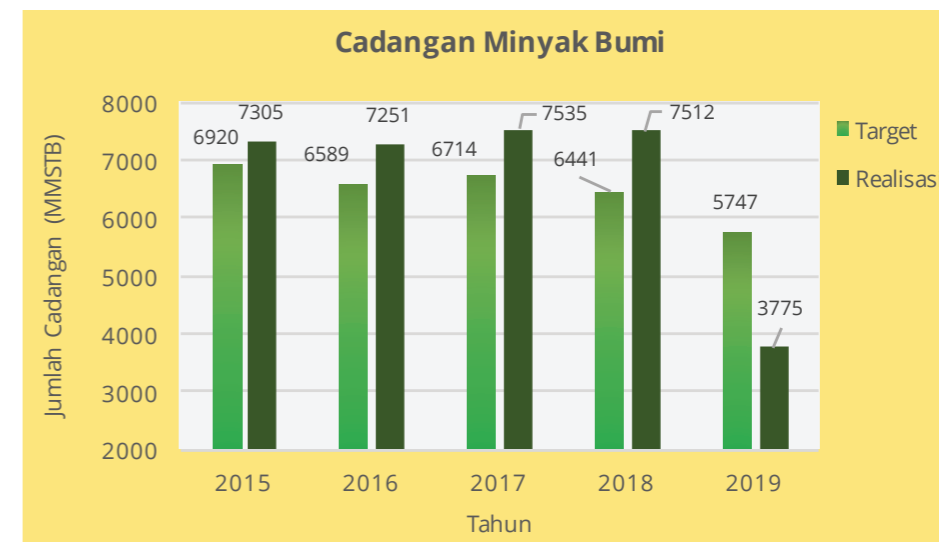
jumlah cadangan terbukti sebesar 3.171 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 4.364 MMSTB. Peningkatan cadangan di tahun 2017 ini disebabkan oleh cadangan kondensat pada Lapangan Abadi. Sejak tahun 2018 perlahan terjadi penurunan lagi sampai dengan akhir 2019 sampai ke angka 3.775 MMSTB.



Grafik 5. Cadangan Minyak Bumi Indonesia

Dengan melihat persentase capaian antara target dan realisasi yang sudah ditetapkan, selama kurun

waktu 2015-2018, capaian mencapai lebih dari 100 % sebagaimana grafik 6 berikut :



Grafik 6. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi

Namun ditahun 2019, realisasi cadangan menurun ini dikarenakan antara lain:

a. Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada Petroleum Resources Management System (PRMS) 2018, dimana lapangan- lapangan yang tidak ada project pemroduksian (tidak diusahakan) cadangannya berpindah kelas menjadi contingent dan unrecoverable. Perubahan klasifikasi cadangan minyak bumi yang signifikan terjadi a.l. di lapangan-lapangan dari Pertamina

EP (P1 : 436; P2 : 491.21; P3 : 719.76 juta barel), PHE ONWJ (P1 : 202 juta barel), Rokan (P2 : 902.21 juta barel).

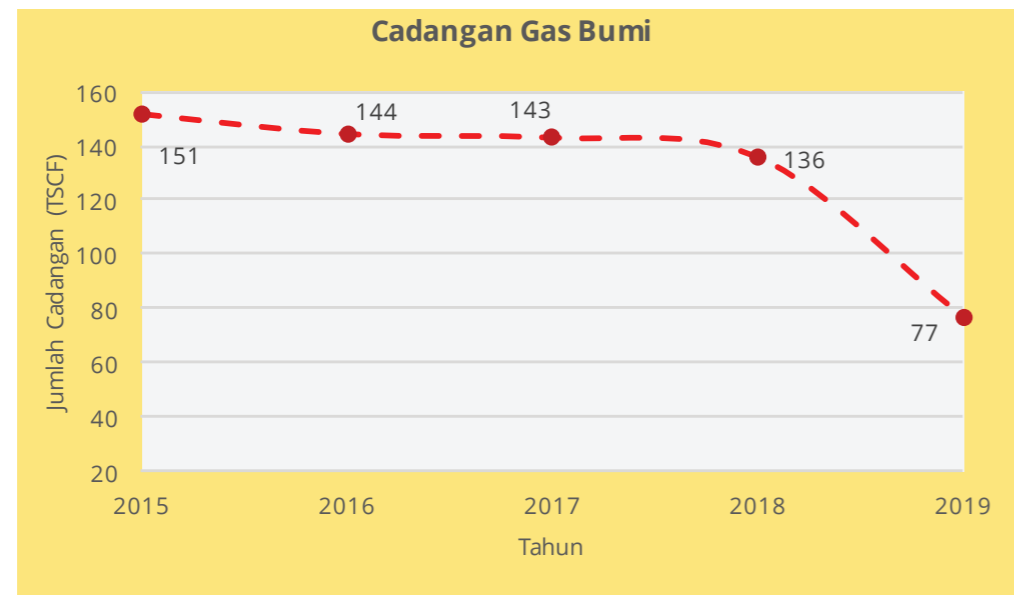
b. Penurunan cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran- pengeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.

Sehingga mempengaruhi perhitungan realisasi cadangan dan ini berbeda dengan tahun 2018 ke belakang

#### d. Cadangan Gas Bumi

Seperti halnya cadangan minyak bumi, cadangan gas bumi Indonesia pun selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan (Grafik 7). Meskipun pencapaian cadangan gas bumi pada tahun 2017 masih kurang dari target, persentase angka pencapaian cadangan gas bumi masih berada di

atas 90% (Grafik 8). Realisasi lebih dari 90 % untuk cadangan gas bumi ini tidak hanya pada tahun 2017 saja, namun itu terjadi di tahun sebelumnya seperti tahun 2016. Bahkan pada tahun 2015, pencapaian melebihi target 147 TSCF dengan realisasi sebesar 151 TSCF.



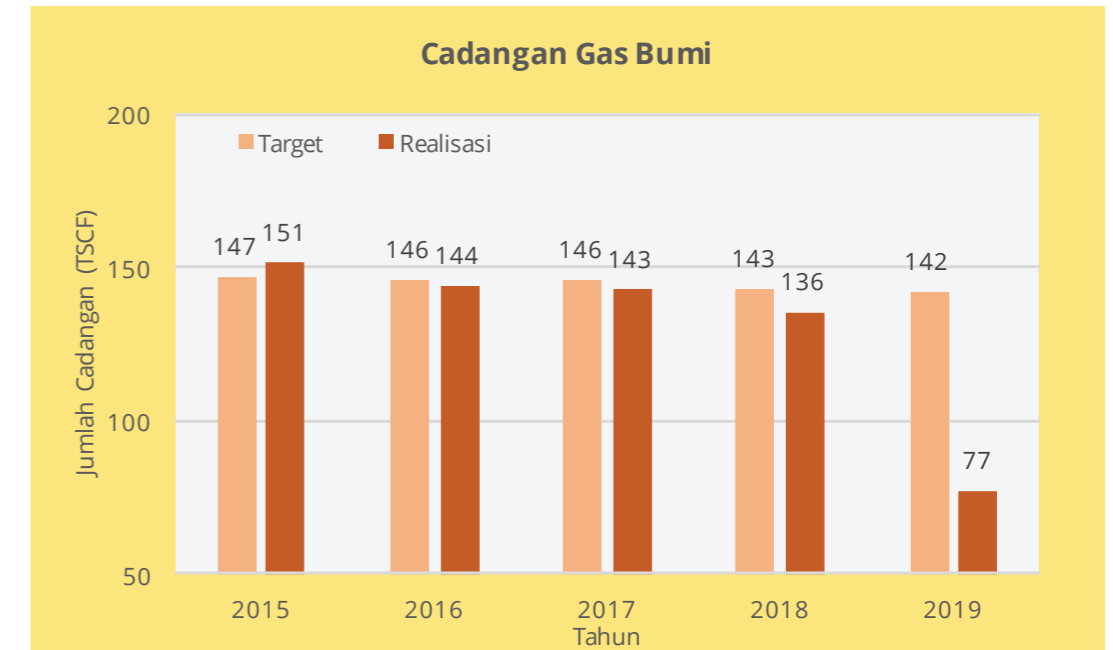
Grafik 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia

Ditahun 2019 terjadi penurunan cadangan gas bumi secara signifikan menjadi 77 TCF yang semula ditargetkan sebesar 142 TCF (Grafik 8). Hal ini dikarenakan :

a. Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada Petroleum Resources Management System (PRMS) 2018, dimana lapangan- lapangan yang tidak ada

project pemroduksian (tidak diusahakan) cadangannya berpindah kelas menjadi *contingent* dan *unrecoverable*.

b. Penurunan cadangan Kontraktor karena adanyas perhitungan ulang dengan adanya pengeboran- pengeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.



Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia

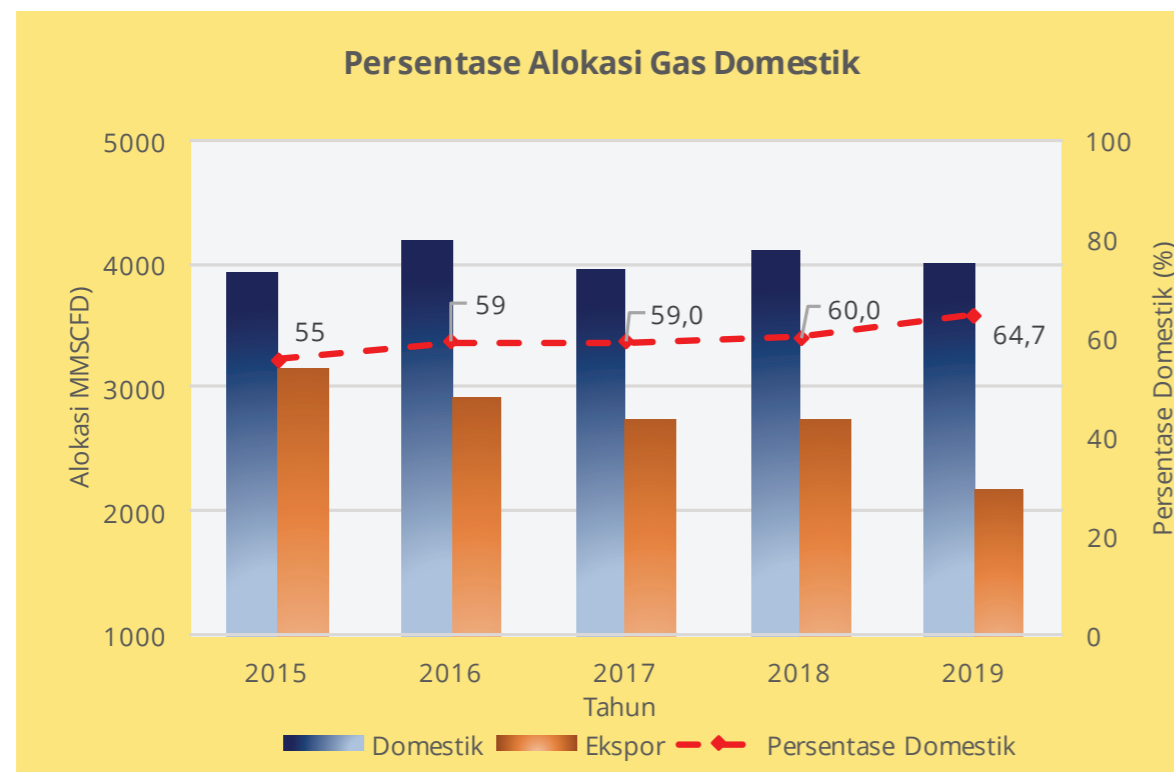


## 2.4 PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

### Persentase Alokasi Gas Domestik

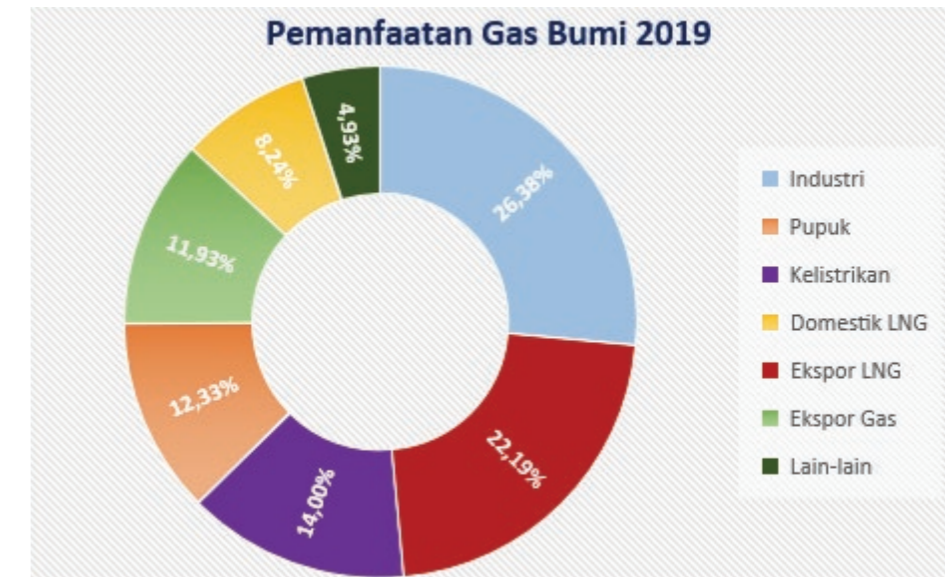
Pengelolaan energi diarahkan menuju energi berkeadilan melalui peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata kelola penyediaan energy yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap. Gas bumi tidak lagi dianggap sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Dalam hal ini, telah dicantumkan target alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2015-2019. Pemanfaatannya gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), lifting minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga dan transportasi.

Selama periode 2015-2019, nilai realisasi alokasi gas untuk dalam negeri (domestik) telah melampaui nilai ekspor. Pada tahun 2019, pasokan gas untuk domestik sekitar 64,87% dengan capaian 101%. Total penyaluran gas bumi selama tahun 2019 adalah 6179,76 MMSCFD. Presentase realisasi alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik merupakan capaian yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti yang terlihat dalam Grafik 9. Ini merupakan capaian prestasi yang paling tinggi bagi pemerintah dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri.



Grafik 9. Persentase Alokasi Gas Bumi Domestik

Sedangkan realisasi pemanfaatan gas bumi untuk berbagai keperluan dibagi kedalam beberapa sektor sebagaimana Grafik 10 berikut:



Grafik 10. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2019

Upaya yang akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha pemanfaatan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri antara lain:

- Mengurangi dan menghentikan suplai gas bumi untuk ekspor

- Melakukan pemerataan pembangunan pipa yang digunakan untuk mengalirkan gas

### e. Fasilitasi Pembangunan FSRU

Pembangunan fasilitas *Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) / Regasifikasi / Onshore/ Liquefied Natural Gas Terminal* merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menyediakan infrastruktur energi khususnya di subsektor minyak dan gas bumi. Pemerintah terus mendorong optimalisasi bauran energi salah satunya dengan

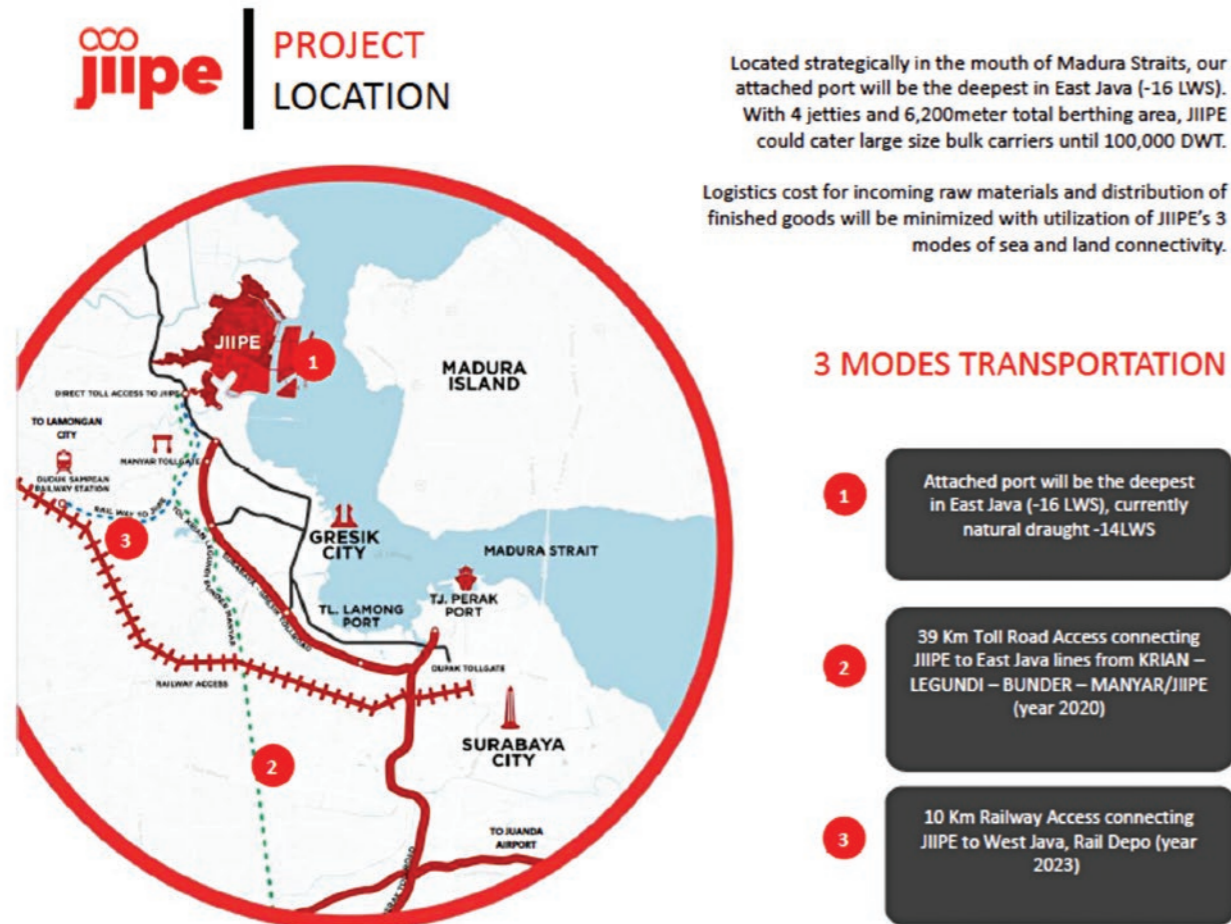
pembangunan berbagai macam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 terdapat pengajuan 2 Badan Usaha yang meminta difasilitasi yaitu PT Nusantara Regas dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

**PT Berkah Kawasan Manyar**

Mengajukan permohonan pembangunan jaringan yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu JIPE- Kabupaten Gresik dengan pipa ukuran 16" sepanjang 1.4 km dari rencana yang dibangun sepanjang 2.2 km. Namun dari hasil evaluasi Ditjen Migas permohonan tersebut masih dipertimbangkan dikarenakan terdapat Badan Usaha yang sudah memiliki fasilitas infrastruktur gas bumi. Sesuai Permen ESDM No 04/2018 bahwa dipertimbangkan untuk menghindari suatu Wilayah Jaringan Distribusi yang memiliki fasilitas eksisting yang sama untuk dua atau lebih identitas yang berbeda (bertingkat).

**PT Nusantara Regas**

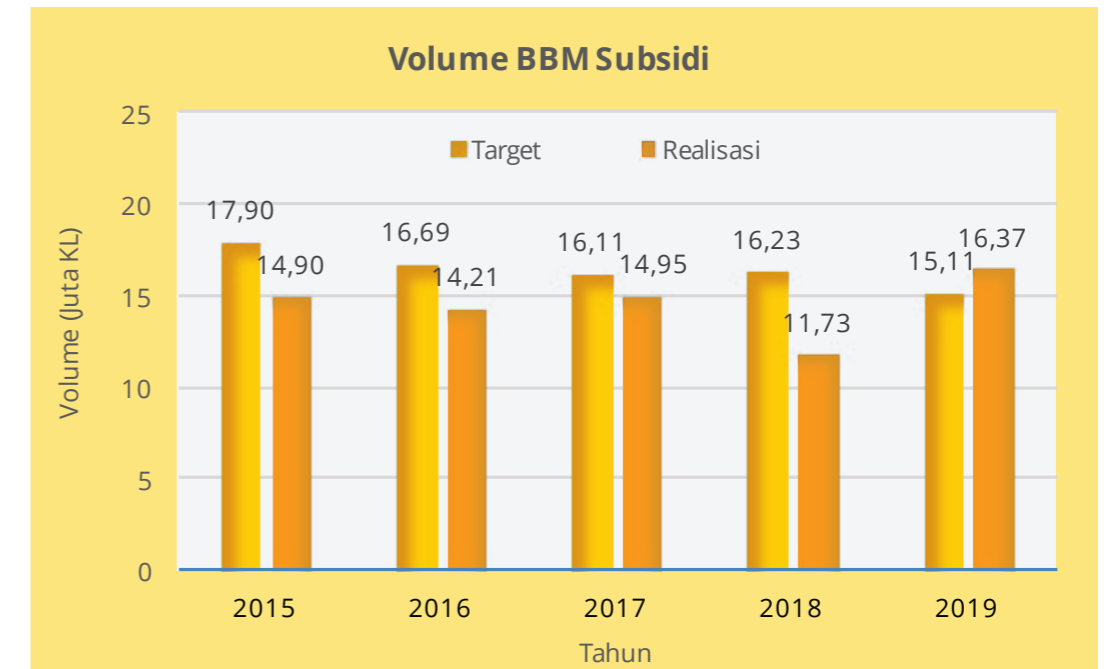
Badan Usaha ini berencana untuk membangun FSRU di Kota Cilacap guna memenuhi kebutuhan gas bumi untuk Kilang Minyak Cilacap dan industri di wilayah Cilacap - sekitarnya. Berdasarkan hasil evaluasi dijelaskan bahwa dari kondisi eksisting terdapat BU yang memiliki Izin Penyimpanan Sementara Migas yang akan habis di April 2020. Untuk itu perlu dipertimbangkan beberapa skenario yaitu skenario 1 bekerja sama dengan BU tersebut atau skenario 2 menunggu sampai tidak diperpanjangnya Izin Penyimpanan Sementara Migas April 2019.



Gambar 5. Rencana Pembangunan Jaringan Pipa yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu JIPE – Kabupaten Gresik

**2.5 VOLUME BAHAN BAKAR BERSUBSIDI**

Pada tahun 2019, penugasan penyaluran BBM diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. AKR. Selanjutnya, data realisasi dimaksud diverifikasi oleh BPH Migas. Target dan Realisasi BBM Bersubsidi dari tahun ke tahun terus menurun. Penurunan tersebut seiring langkah pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif berupa pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah sudah tidak memberikan subsidi ke Premium semenjak tahun 2016 tetapi hanya menetapkan subsidi tetap pada solar dan minyak tanah. Pada tahun 2019, Pemerintah telah menganggarkan subsidi BBM sebesar 15,11 Juta KL sesuai dengan target APBN yang sudah disetujui oleh DPR dengan pencapaian realisasi sebesar 16,37 Juta KL atau sebesar 92% dari target yang ditetapkan (grafik). Capaian realisasi BBM Bersubsidi ini mengalami penurunan 10% dari keberhasilan pengendalian volume BBM bersubsidi tahun 2018 di mana pada tahun 2018 targetnya adalah 16,23 Juta KL dengan realisasi volume BBM Bersubsidi 16,12Juta KL



Grafik 11. Volume Target dan Realisasi BBM Subsidi 2015-2019

Bahkan realisasi tahun 2019 melebihi target volume BBM bersubsidi tahun 2018. Apabila subsidi BBM ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi penghematan, kinerja penyediaan subsidi BBM ini akan dikatakan baik bilamana subsidi diberikan secara tepat sasaran. Kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,12 juta Kl (6,90%) dibandingkan Kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sebesar 16,23 juta KL (Grafik 11) dengan rincian masing-masing jenis BBM dapat dilihat pada tabel berikut :

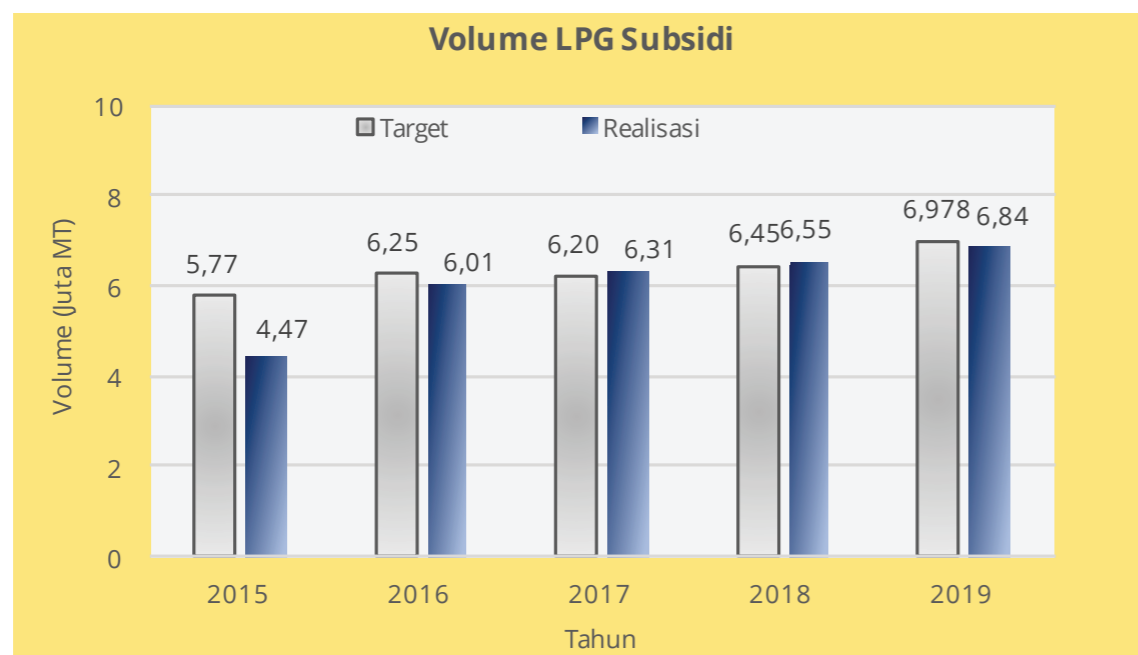
Tabel 1. Realisasi Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) Tahun 2019

NO	KEGIATAN	OUTPUT	REALISASI FISIK (%)
1.	Bensin (Gasoline) RON 88	-	-
2.	Minyak Tanah	0,610	0,52
3.	Minyak Solar (Gasoil)	14,50	15,85
<b>TOTAL</b>		<b>15,11</b>	<b>16,37</b>

## 2.6 VOLUME LPG BERSUBSIDI

Realisasi penyaluran LPG 3 Kg diperoleh dari data Pertamina dan diverifikasi oleh Ditjen Migas. Target volume LPG Bersubsidi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan diterapkannya program diversifikasi BBM ke Gas.

Tercatat realisasi sampai dengan akhir tahun 2019, volume LPG Bersubsidi sebesar 6,84 juta Mton dari target 6,978 juta Mton. Adapun target dan realisasi LPG Bersubsidi selama lima tahun terakhir lebih rinci dapat terlihat pada Grafik 12 berikut:



Grafik 12. Volume Target dan Realisasi LPG Bersubsidi 2015-2019

Berdasarkan data target APBN dan realisasi tersebut maka pencapaian kinerja sebesar 102%. Kuota Volume LPG Tabung 3 Kg ini mengalami kenaikan sebesar 0,528 juta Mton (8.19%) dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6,45 juta Mton. Hal ini disebabkan karena pada 2 tahun kebelakang antara tahun 2017-2018 realisasi Volume LPG tabung 3 Kg melebihi kuota yang ditetapkan oleh APBN dan dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan LPG tabung 3 Kg di masyarakat, dengan begitu maka Kuota tahun 2019 mengalami penambahan menjadi 6,978 juta Mton.

Untuk mengurangi konsumsi LPG Tabung 3 Kg, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan LPG tabung 3 Kg melalui:

1. Melakukan Trade in LPG 3 Kg ke 5,5 Kg
2. Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 Kg

Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan

pengendalian subsidi LPG Tabung 3 Kg ini antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran;
2. Membuat kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota;
3. Melakukan sosialisasi pengendalian LPG 3 Kg ke Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti oleh

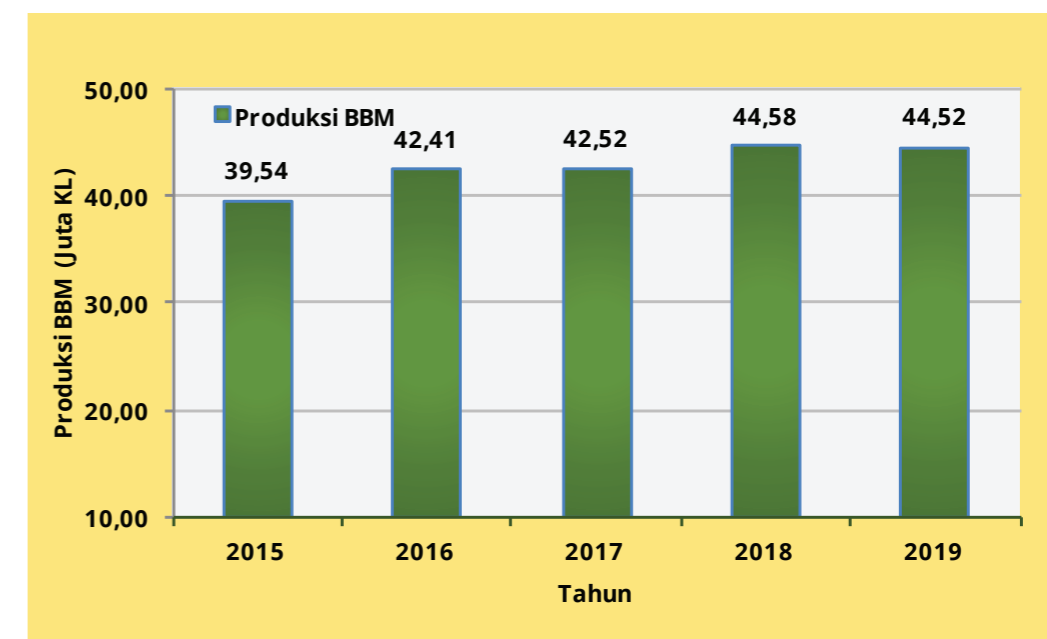
pemerintah daerah berupa surat himbuan Pemerintah Daerah terkait penggunaan LPG 3 Kg (saat ini yang telah teridentifikasi 11 Gubernur dan 152 Walikota/Bupati);  
4. Bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyelewengan subsidi LPG 3 Kg.

## 2.7 KAPASITAS KILANG BBM

### a. Produksi BBM dari Kilang dalam Negeri

Untuk produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri pada tahun 2019 adalah 44,52 juta KL (capaian 106%). Total produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini lebih besar dari yang ditargetkan sebesar 42 juta KL, hal ini disebabkan karena ada penambahan produk dan volume produksi Bahan

Bakar Minyak jenis Pertamina dan Avtur dengan beroperasinya Proyek Langit Biru Cilacap, RU IV PT Pertamina (Persero). Data produksi BBM 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam Grafik 13 berikut :



Grafik 13. Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri Tahun 2015-2019

### b. Kapasitas Kilang BBM dalam Negeri

Kapasitas kilang minyak di Indonesia tahun 2019 adalah 1.169 MBCD, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata usia kilang sekitar 30 tahun. Dari tahun 2015 hingga 2019

kapasitas kilang BBM di Indonesia tidak mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kapasitas Kilang BBM Nasional

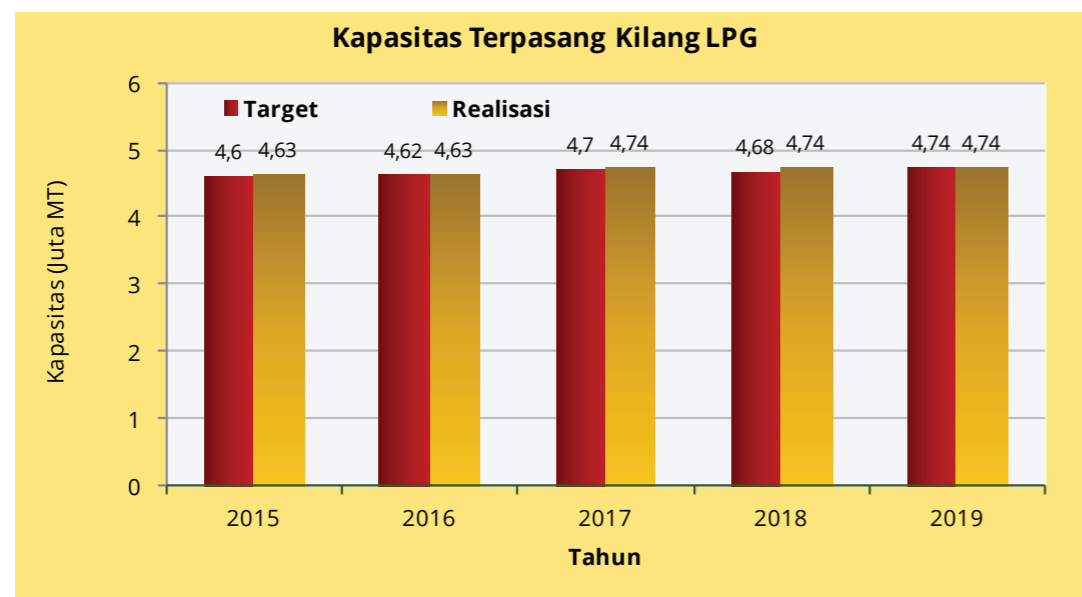
Tahun	Target (MBCD)	Realisasi (MBCD)
2015	1.169	1.169
2016	1.167	1.169
2017	1.169	1.169
2018	1.169	1.169
2019	1.169	1.169

Belum selesainya proyek pengembangan kilang minyak RDMP PT Pertamina (Persero) dan proyek pembangunan kilang minyak GRR PT Pertamina (Persero) menyebabkan belum bertambahnya kapasitas kilang minyak di Indonesia. Terhambatnya proyek RDMP maupun GRR dikarenakan salah satunya belum adanya kesepakatan antara Pertamina dengan Investor dalam hal pengerjaan proyek dimaksud, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak pada terhambatnya

pembebasan lahan disekitar lokasi proyek. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengolahan crude oil menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum efisien dan kompleksitasnya yang rendah. Dengan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dipenuhi dari impor.

## 2.8 KAPASITAS TERPASANG KILANG LPG

Realisasi Kapasitas kilang LPG selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 14. Kapasitas Kilang LPG Periode 2015-2019

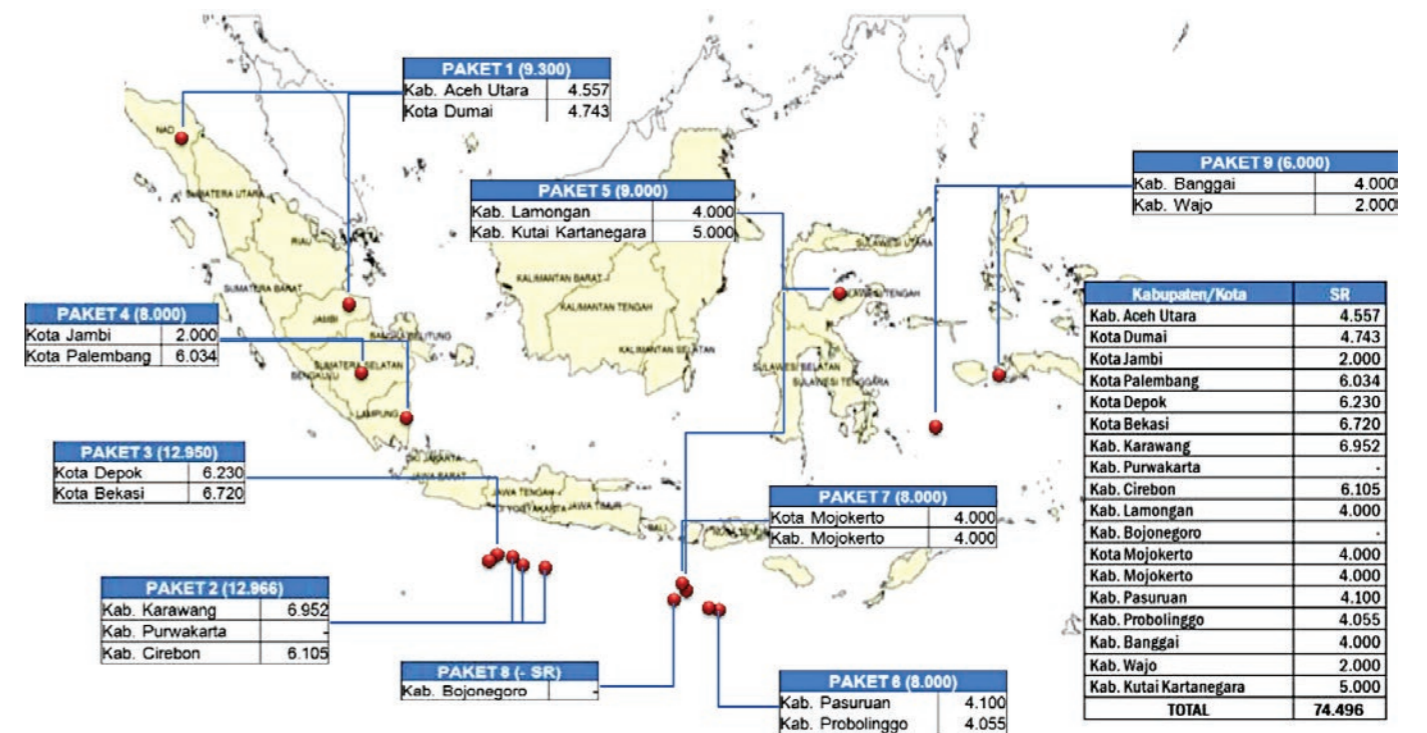
Selama tahun 2019 tidak dilakukan pembangunan dan pengembangan kilang gas (LPG) sehingga menyebabkan kapasitas Kilang LPG tidak mengalami pertambahan pada tahun 2019. Namun demikian, kapasitas produksi LPG dapat meningkat setelah selesainya proyek pengembangan kilang minyak

RDMP dan pembangunan kilang minyak GRR PT. Pertamina yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil perhitungan tim, penambahan kapasitas kilang yang akan terjadi jila kilang RDMP dan GRR selesai pada 2024-2026 adalah sekitar 30%-45%.

## 2.9 PEMBANGUNAN JARINGAN GAS RUMAH TANGGA

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pembangunan selanjutnya menyebar ke beberapa Provinsi sampai dengan tahun 2019, total rumah tangga tersambung jaringan Gas adalah sebanyak 400.269 SR di 17 Provinsi 47 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil penyusunan dokumen Front End Engineering Design (FEED) - Detail Engineering Design for Construction (DEDC), pada TA 2019 Ditjen Migas c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496

SR dari target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 78.216 SR dengan penugasan pada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sebagai Tim Pendukung pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Tidak tercapainya 4.000 SR untuk Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kab. Bojonegoro dikarenakan waktu untuk penyelesaian pembangunannya tidak mencukupi, saat pemenang lelang diumumkan pada akhir Juli 2019. Berikut sebaran Wilayah yang sudah terbangun jaringan gas rumah tangga sepanjang tahun 2019 beserta total realisasinya.



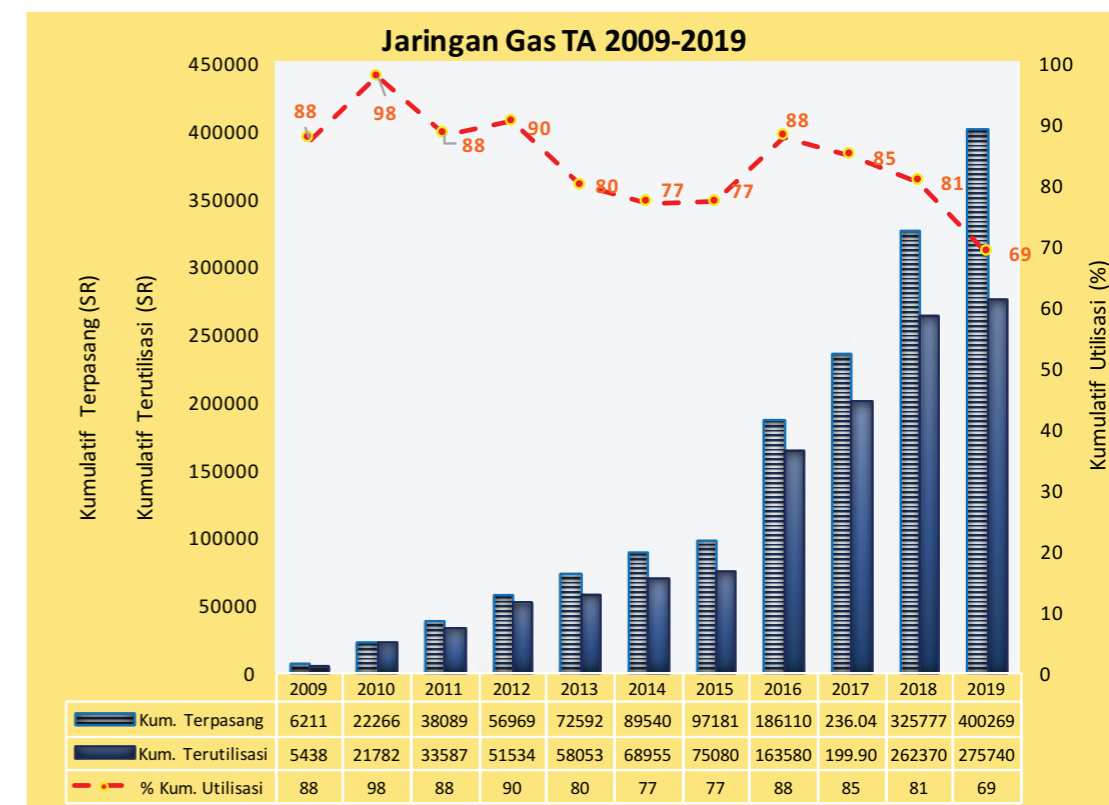
Gambar 6. Total Realisasi Pembangunan Jargas APBN Tahun 2019 : 74.496 SR (16 lokasi)

Dengan progress kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 3. Progres Kegiatan Jargas sampai dengan Akhir 2019

NO	PAKET	KEGIATAN	OUTPUT	NILAI KONTRAK (Rp. M)	REALISASI		KETERANGAN
					FISIK (%)	KEU (%)	
<b>Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (EPC)</b>							
1	1	Kab. Aceh Utara	4.557 SR	94,102	100	100	Telah BAST-1 tanggal 15 Desember 2019
2		Kota Dumai	4.743 SR				
3	2	Kab. Karawang	6.952 SR	94,965	100	100	Telah BAST-1 tanggal 7 Desember 2019
4		Kab. Cirebon	6.105 SR				
5	3	Kota Depok	6.230 SR	100,159	100	100	Target BAST-1 tanggal 24 Desember 2019
6		Kota Bekasi	6.720 SR				
7	4	Kota Jambi	2.000 SR	68,919	100	100	Target BAST-1 pada 26 Desember 2019
8		Kota Palembang	6.034 SR				
9	5	Kab. Lamongan	4.000 SR	79,841	100	100	Telah BAST-1 tanggal 13 Desember 2019
10		Kab. Kutai Kartanegara	5.000 SR				
11	6	Kab. Pasuruan	4.100 SR	67,071	100	100	Telah BAST-1 tanggal 25 November 2019
12		Kab. Probolinggo	4.055 SR				
13	7	Kota Mojokerto	4.000 SR	70,198	100	100	Telah BAST-1 tanggal 28 November 2019
14		Kab. Mojokerto	4.000 SR				
15	8	Kab. Bojonegoro	4.000 SR	-	-	-	Pembangunan ditunda ke tahun 2020, anggaran digunakan untuk pembayaran tunggakan paket perdana konversi mitan ke LPG 3 kg TA 2018
16	9	Kab. Banggai	4.000 SR	70,864	100	100	Telah BAST-1 tanggal 27 November 2019 Terdapat sisa kontrak Rp. 117.284.756,00
17		Kab. Wajo	2000 SR				

Sedangkan keseluruhan total realisasi dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik 15 berikut:



Grafik 15. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2019

## 2.10 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA BAHAN BAKAR GAS (KERJA SAMA PEMBANGUNAN SPBG DENGAN NEDO)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi, Pemerintah terus melakukan upaya penambahan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh BBG untuk transportasi jalan. Upaya tersebut antara lain dengan kerja sama hibah dengan the New Energy and Industrial Technology Development Organization Japan (NEDO), dan pada tanggal 11 Desember 2017 telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* tentang *Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment*.

Melalui kerja sama hibah tersebut rencananya akan dibangun 3 (tiga) unit SPBG yang berlokasi:

1. Jalan Abdul Muis, Jakarta;

2. Jalan Sudirman, Tangerang Banten; dan
3. KIIC Karawang, Jawa Barat.

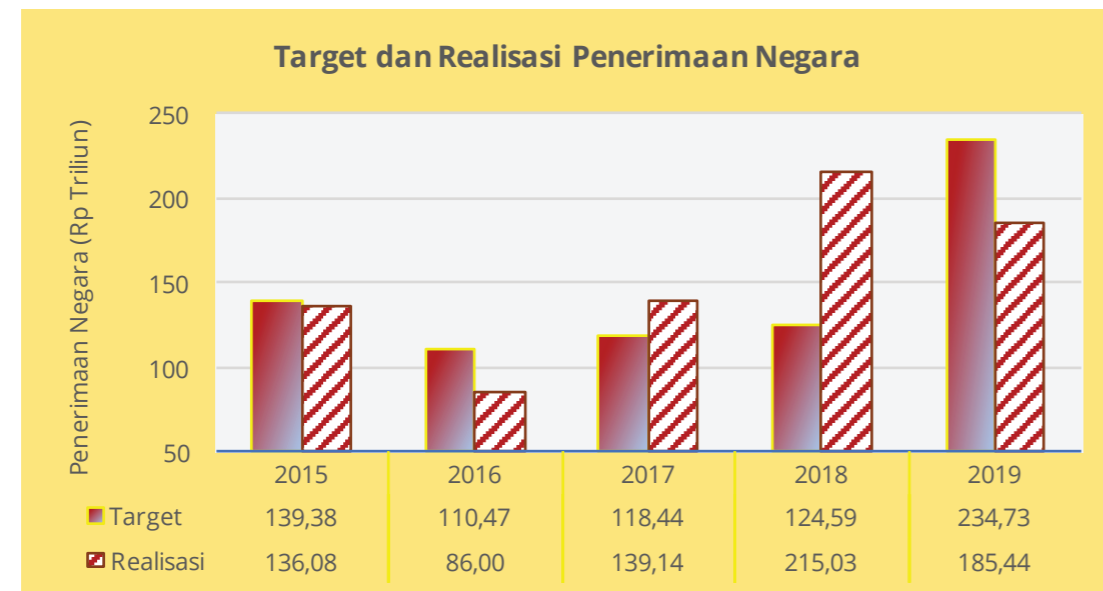
Dalam rangka implementasi kegiatan *Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment* tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga mengingat implementasi kegiatan melibatkan instansi lain di luar Kementerian ESDM.

Pada tanggal 17 Desember 2019, telah dilaksanakan peresmian SPBG di KIIC Karawang, Jawa Barat yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang mewakili Menteri ESDM, sedangkan untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu di Jalan Abdul Muis-Jakarta dan Jalan Sudirman - Tangerang, Banten, direncanakan akan selesai pembangunannya di tahun 2020.

## 2.11 JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

Berdasarkan Rapat Pemerintah dan DPR diperoleh asumsi makro yaitu *lifting* minyak bumi sebesar 775 MBOPD, *lifting* gas bumi sebesar 1.250 MBOED dan harga minyak (ICP) sebesar US\$ 70 barel. Sedangkan besaran realisasi penerimaan negara Migas itu sendiri dipengaruhi oleh realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Tercatat realisasi sampai dengan akhir desember, *lifting* sebesar 745,61 MBOPD, *lifting* gas bumi sebesar 1.057MBOEPD, dan ICP 62,37

US\$/Barrel. Dari hasil realisasi itu menghasilkan realisasi penerimaan migas sebesar 185,44 Triliun rupiah atau mencapai 79 % dari target yang sudah ditetapkan sebesar 234,73 Triliun rupiah. Nilai penerimaan ini tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 215 Triliun rupiah. Turunnya *lifting* migas menjadi salah satu penyebab penurunan Penerimaan Migas di tahun 2019. Lebih lengkap berikut data target dan realisasi PNBPN selama lima tahun terakhir pada Grafik 16.



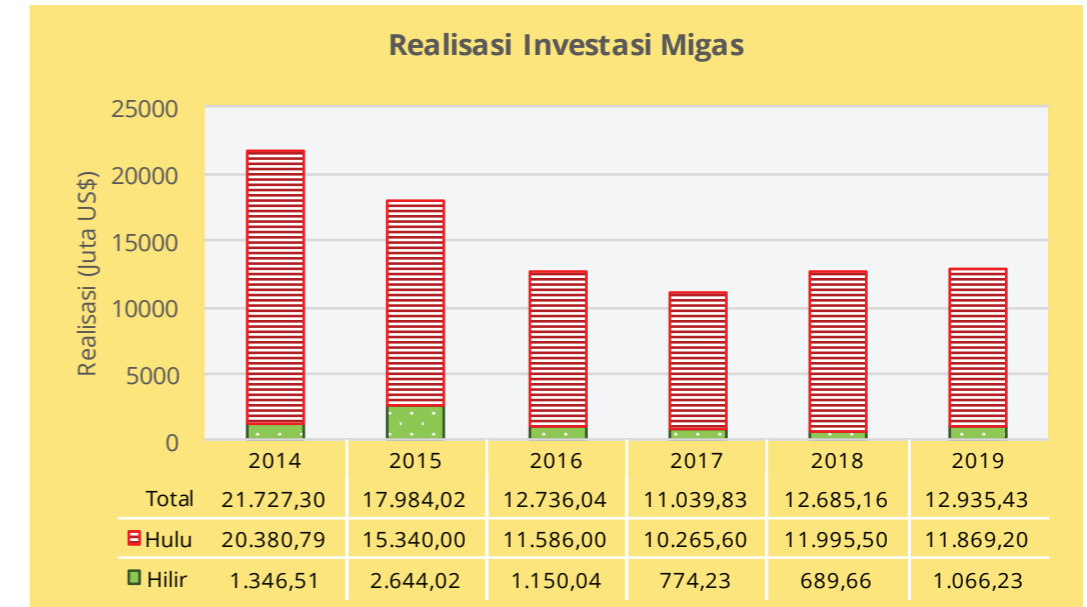
Grafik 16. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Migas 2014-2019

Penerimaan Negara melalui subsektor Migas berasal dari beberapa hal berikut, antara lain:

- Penerimaan Pajak Migas (PPh Migas)  
Kegiatan usaha hulu migas berbasis kontrak (antara pemerintah dengan KKKS)
- PNBP SDA Migas  
Hasil penjualan *lifting* migas bagian negara. Nantinya pendapatan negara dari *lifting* migas juga menjadi sumber pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil.  
Dana hasil penjualan *lifting* migas disimpan dalam:
  - Rekening Migas di Bank Indonesia
  - Langsung disetor ke kas negara dalam

- PNBP Lainnya terdiri dari DMO, denda, bonus produksi, transfer aset, pengembalian sisa biaya operasional SKK Migas, dan pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas.

## 2.12 INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



Grafik 17. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2014 - 2019

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 17, Realisasi investasi Migas tahun 2019 sebesar US\$ 12.935 Miliar berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 11.869 Miliar yang didapat dari *capital & non-capital expenditure* KKKS Eksplorasi (PSC), KKKS Produksi (PSC), dan KKKS Produksi (GSC) dan US\$ 1.066 Miliar yang diperoleh dari Badan Usaha sektor hilir. Realisasi total Investasi hulu maupun hilir ini mencapai 96% dari angka yang ditargetkan sebesar US\$ 13,43 Miliar.

Apabila dibandingkan dengan investasi hulu, realisasi investasi hilir lebih resisten terhadap dinamika perubahan harga minyak bumi. Dengan kata lain, naik turunnya harga minyak dalam satu

tahun tidak semerta-merta mempengaruhi realisasi investasi hilir migas di tahun terkait maupun tahun selanjutnya. Hal ini berbeda dengan realisasi investasi hulu migas yang sangat responsif terhadap perubahan harga minyak bumi. Mengingat realisasi investasi migas didominasi oleh investasi hulu migas, maka total realisasi investasi migas menjadi sangat dipengaruhi oleh harga minyak bumi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai investasi sejauh ini bersifat internal. Faktor eksternal seperti harga minyak dunia tidak dapat dihindari karena memang sudah mekanisme pasar. Berikut tantangan dan solusi dalam rangka menggairahkan investasi baik di hulu maupun hilir migas

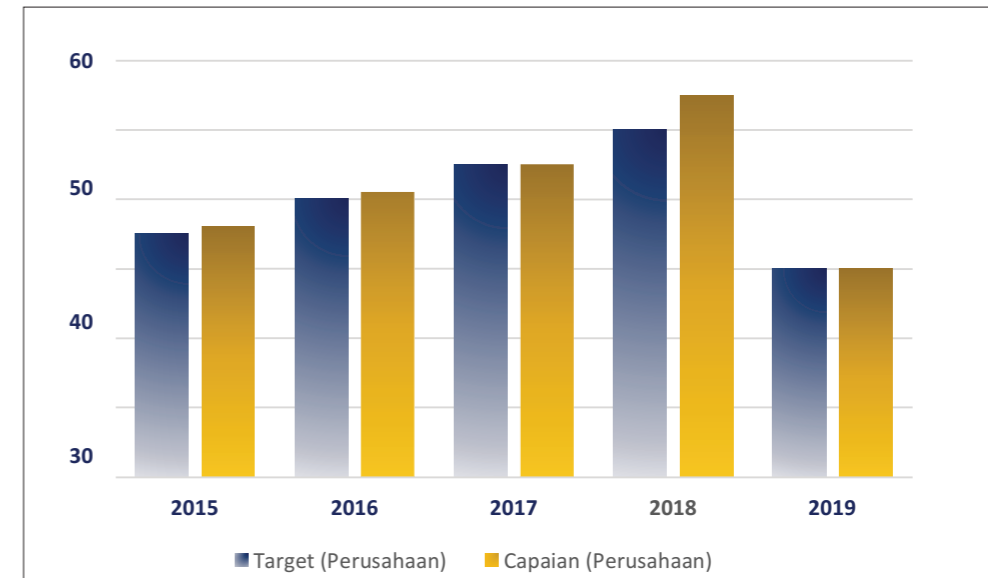
Tabel 4. Tantangan dan Solusi Investasi Hulu dan Hilir Migas

	TANTANGAN	SOLUSI
HULU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbuktinya potensi Shale Gas di Indonesia</li> <li>2. Terms &amp; conditions dinilai kurang menarik bagi investor</li> <li>3. Keekonomian proyek migas non konvensional</li> <li>4. Gagalnya beberapa proyek pengembangan migas non konvensional</li> <li>5. Ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan data dan <i>joint study</i> dan survei umum akan dipermudah</li> <li>2. Lelang WK dipermudah</li> <li>3. Percepatan POD</li> <li>4. Implementasi inovasi dan teknologi tepat guna</li> <li>5. Penerapan kontrak gross split</li> <li>6. Penyederhanaan perizinan</li> </ol>
HILIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebasan lahan untuk pembangunan kilang</li> <li>2. Belum ada kesepakatan teknis dengan pihak investor untuk pembangunan kilang.</li> <li>3. Fasilitas insentif dan perpajakan kilang minyak belum tersedia</li> <li>4. Peningkatan pemanfaatan gas bumi</li> <li>5. Persinggungan dengan utilitas instansi lain dalam pembangunan jaringan gas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan perizinan sesuai implementasi Permen ESDM No. 52 tahun 2018</li> <li>2. Perlu revisi perpres 146 tahun 2015 (pengolahan, pembebasan lahan, insentif)</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur gas bumi</li> </ol>

### 2.13 JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK

Sebagaimana pada grafik 16 terlihat bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian Ditjen Migas dengan indikator jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik mencapai 100%. Ditahun 2019, dari target sebanyak 30 perusahaan, semuanya 100% terealisasi. Ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan keteknikan yang baik. Pengawasan keteknikan yang baik adalah dengan penerapan metode rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktik-praktik, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Dalam melakukan pengawasan keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi dapat diukur dengan:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, dan perawatan peralatan yang lebih baik.
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya antara lain pemanfaatan gas suar bakar.
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak.
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan, kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah, dan baku mutu emisi dan limbah.



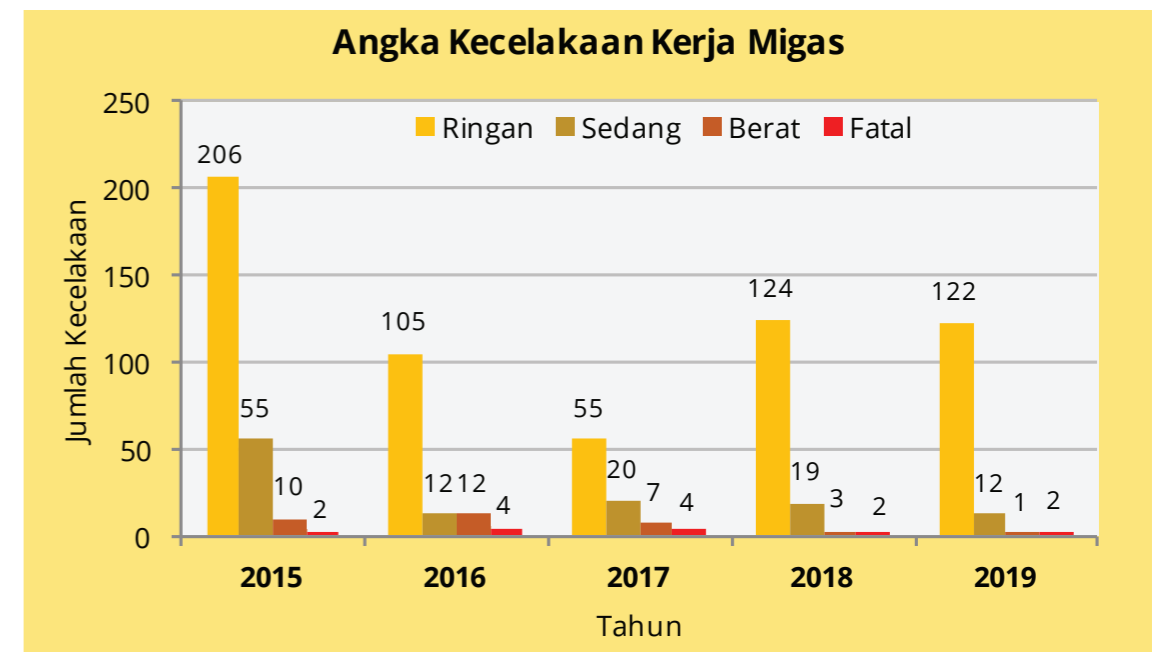
Grafik 18. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan yang Baik

### 2.14 JUMLAH PERUSAHAAN HULU DAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL

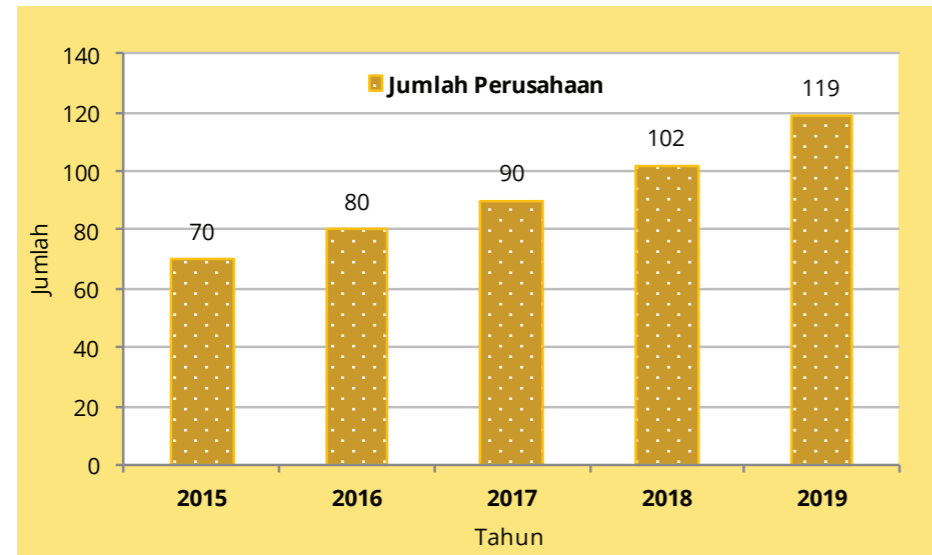
#### a. Hulu

Realisasi indikator kinerja ini tercatat sampai dengan akhir 2019, jumlah kecelakaan akibat kerja di kegiatan usaha hulu migas dengan kategori fatal sejumlah 2. Jumlah tersebut masih bertahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga berjumlah 1. Ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya berjumlah 3 kejadian. Sedangkan

jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kategori berat adalah 3. Informasi lebih lengkap selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas terlihat pada Grafik 19 berikut.



Grafik 19. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

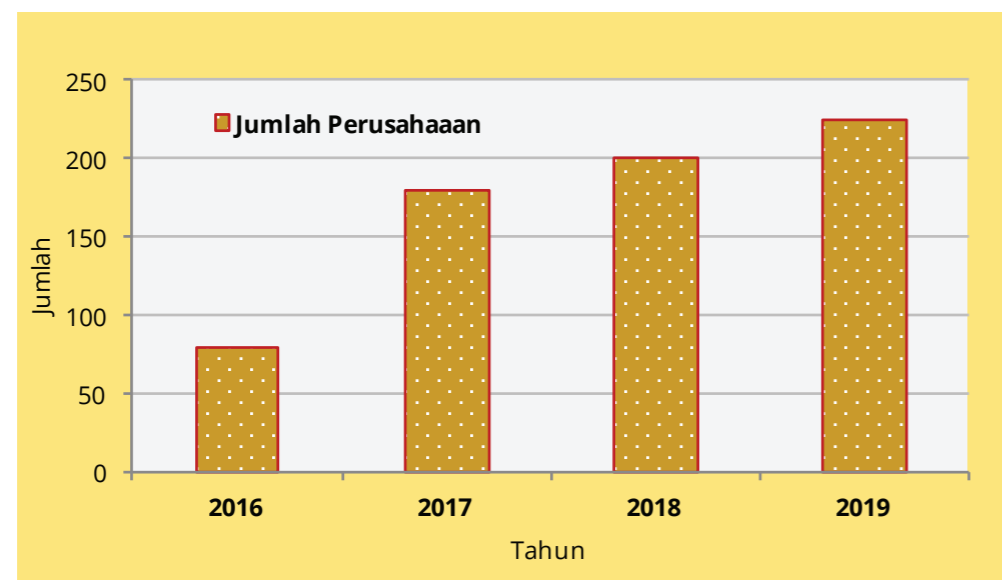


Grafik 20. Jumlah Perusahaan Hulu Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak terjadi Kecelakaan Fatal

Sehingga jika dilihat capaian Ditjen Migas pada indikator ini dapat dilihat pada Grafik 20. Setiap tahun Ditjen Migas mencatat bahwa jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal semakin meningkat. Dari 110 perusahaan yang ditargetkan 2019, realisasi menunjukkan sejumlah 119 perusahaan. Hal ini menunjukkan peran Ditjen Migas dalam pembinaan dan pengawasan, berkomitmen dalam mendorong kegiatan usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan.

**b. Hilir**

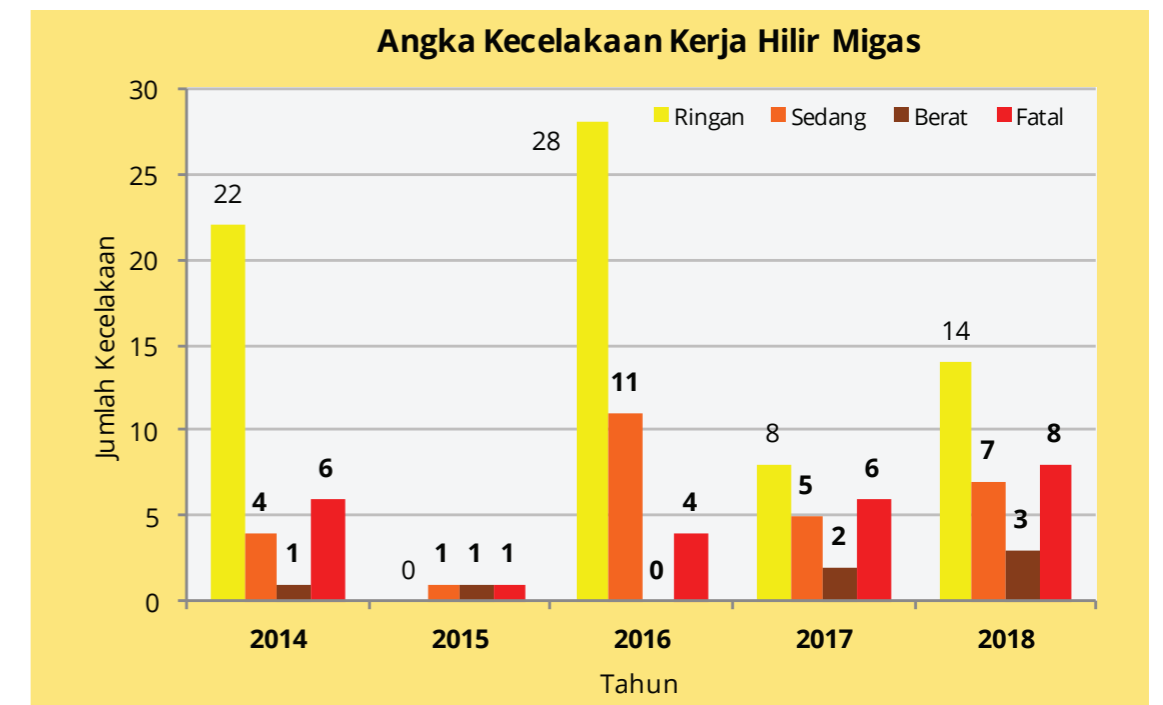
Sepanjang tahun 2019, sebanyak 225 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja dari angka yang ditargetkan 225 Perusahaan atau realisasi pencapaian sebesar 100% (Grafik 19).



Grafik 21. Jumlah Perusahaan Hilir Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak terjadi Kecelakaan Fatal

Sedangkan angka kecelakaan kerja dengan kategori ringan sampai dengan fatal selama 5 tahun sepanjang 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 20. Kerjasama yang baik antara Internal maupun eksternal seperti *stakeholder* pada kegiatan usaha hilir migas beserta dibentuknya Tim Independen

Keselamatan Migas membantu Inspektur Migas dalam melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) dan Investigasi Kecelakaan Migas menjadi upaya untuk mendorong kegiatan usaha hilir migas dapat mencegah terjadinya kecelakaan.



Grafik 22. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas



# 3 RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

## RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

RKT 2020 merupakan penjabaran dan penajaman dari Renstra Ditjen Migas Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan visi dan misi Presiden serta evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019. Dalam

rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, target-target di dalam RKT Ditjen Migas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 sebagai berikut :

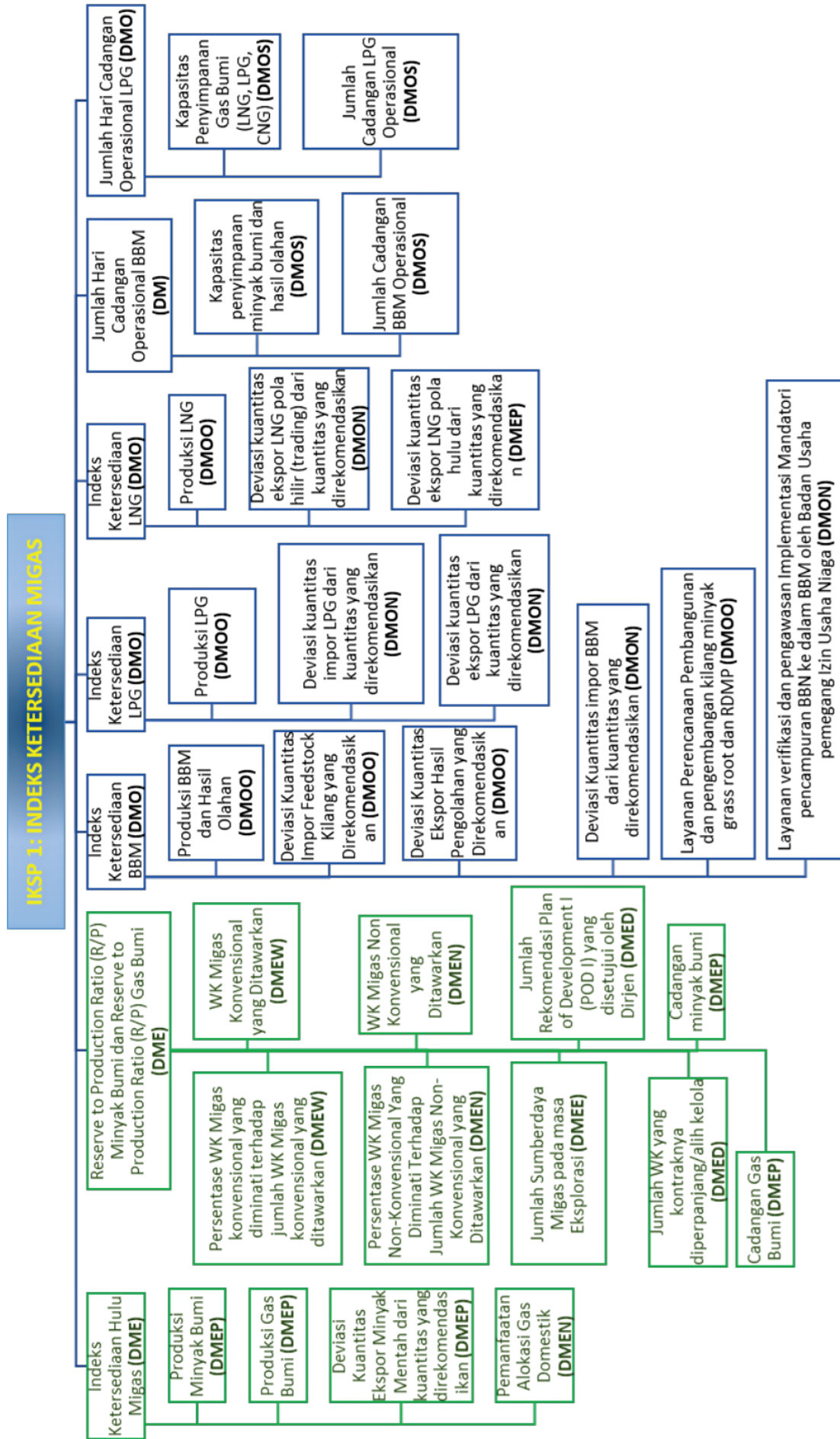
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1
	2	Indeks Keterjangkauan Migas	Indeks	1
	3	Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	1
Meningkatnya Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Migas	4	Tingkat Penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan, program, dan produk migas	%	75
Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi	5	Indeks Pengelolaan Energi Migas	Indeks	1
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan	6	Indeks Keselamatan migas	Indeks	0,88
Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas	7	Indeks Pengendalian dan Pelayanan	Indeks	0,82

### 3.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*) merupakan Indeks yang menunjukkan kemampuan dalam menyediakan sumber minyak dan gas bumi secara nasional baik penyediaan disektor hulu maupun dihilir. Fokus utama penyediaan migas adalah dengan meningkatkan produksi migas di hulu dan meningkatkan cadangan migas melalui penandatanganan wilayah kerja baru sehingga dapat meningkatkan *Reserve to Production Ratio* (R/P). Sedangkan di hilir meningkatkan jumlah hari cadangan operasional BBM dan LPG dan optimalisasi kilang BBM beserta hasil olahan.

Indeks ketersediaan Migas didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO). Indeks Ketersediaan Migas Memiliki sasaran terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 1 berikut :



Bagan 1. Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas

### 3.2 INDEKS KETERJANGKAUAN MIGAS

Indeks Keterjangkauan Migas adalah Indeks yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan migas dengan harga yang terjangkau. Keterjangkauan (*Affordability*) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian nasional tetap terjaga. Harga gas baik di hulu dan hilir beserta harga BBM menjadi faktor dalam penentuan keterjangkauan migas. Dengan terjangkaunya harga energi menjadikan masyarakat sanggup dan mampu dalam menyediakan sumber energinya.

Indeks keterjangkauan Migas didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO). Indeks Keterjangkauan Migas Memiliki sasaran terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 2 berikut :



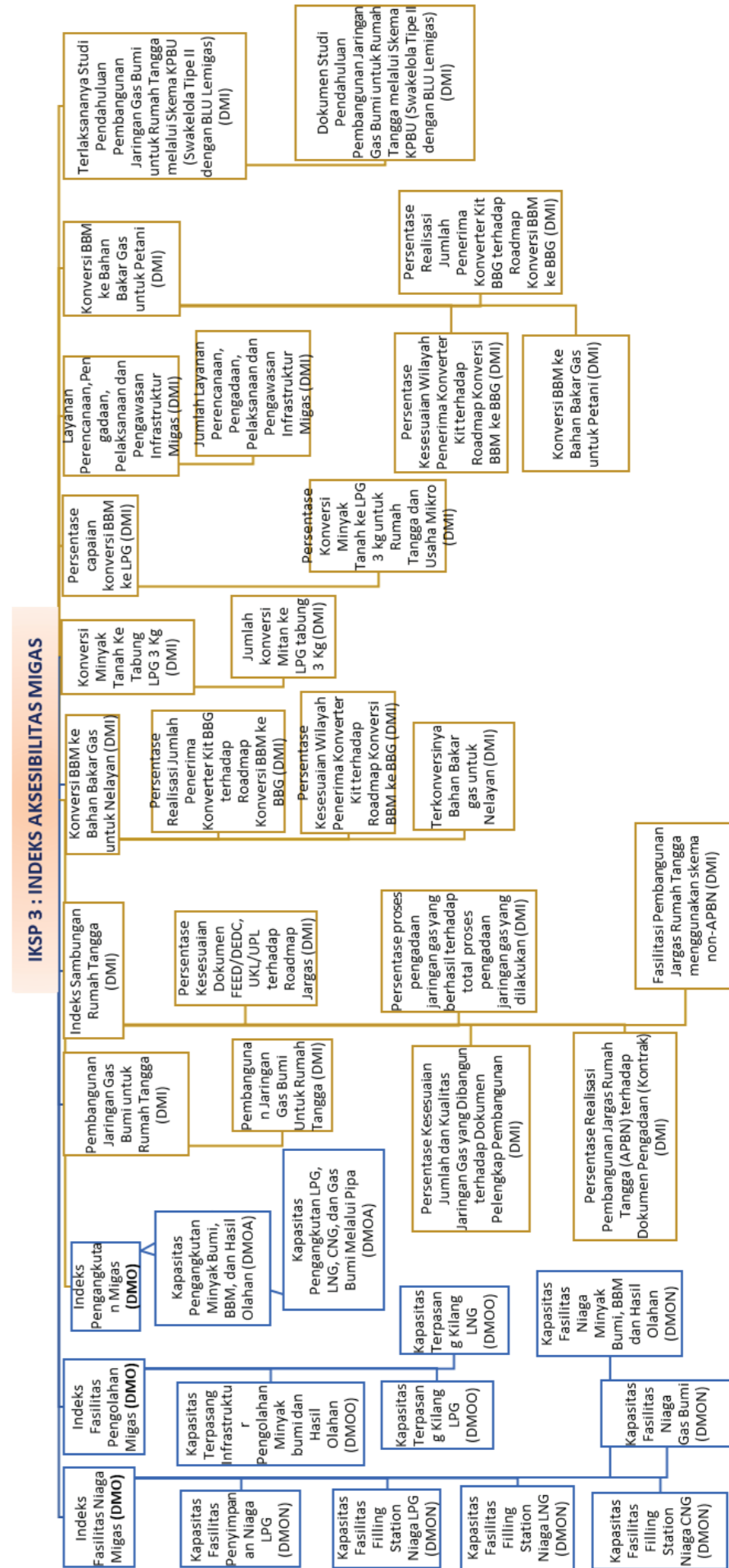
Bagan 2. Indikator Pendukung Indeks Keterjangkauan Migas



### 3.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Indeks Aksesibilitas Migas (*Accessibility*) adalah Indeks yang menunjukkan kemampuan untuk mengakses migas. Dalam hal ini pemerintah ditekankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses migas melalui pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sumber energi migas. Rendahnya akses terhadap energi membuat masyarakat di negara kita kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Sehingga peningkatan akses energi dalam hal ini migas membutuhkan perencanaan yang koheren, kerangka kebijakan dan institusi serta tata kelola yang handal dan akuntabel, pendanaan yang terencana, serta partisipasi berbagai pihak,

pelaku, penerima manfaat, dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensinergikan peningkatan akses energi bagi masyarakat dengan berbagai agenda pembangunan dan ekonomi. Indeks Aksesibilitas Migas didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO) dan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI). Indeks Aksesibilitas Migas Memiliki sasaran terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Aksesibilitas Migas ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 3 berikut :

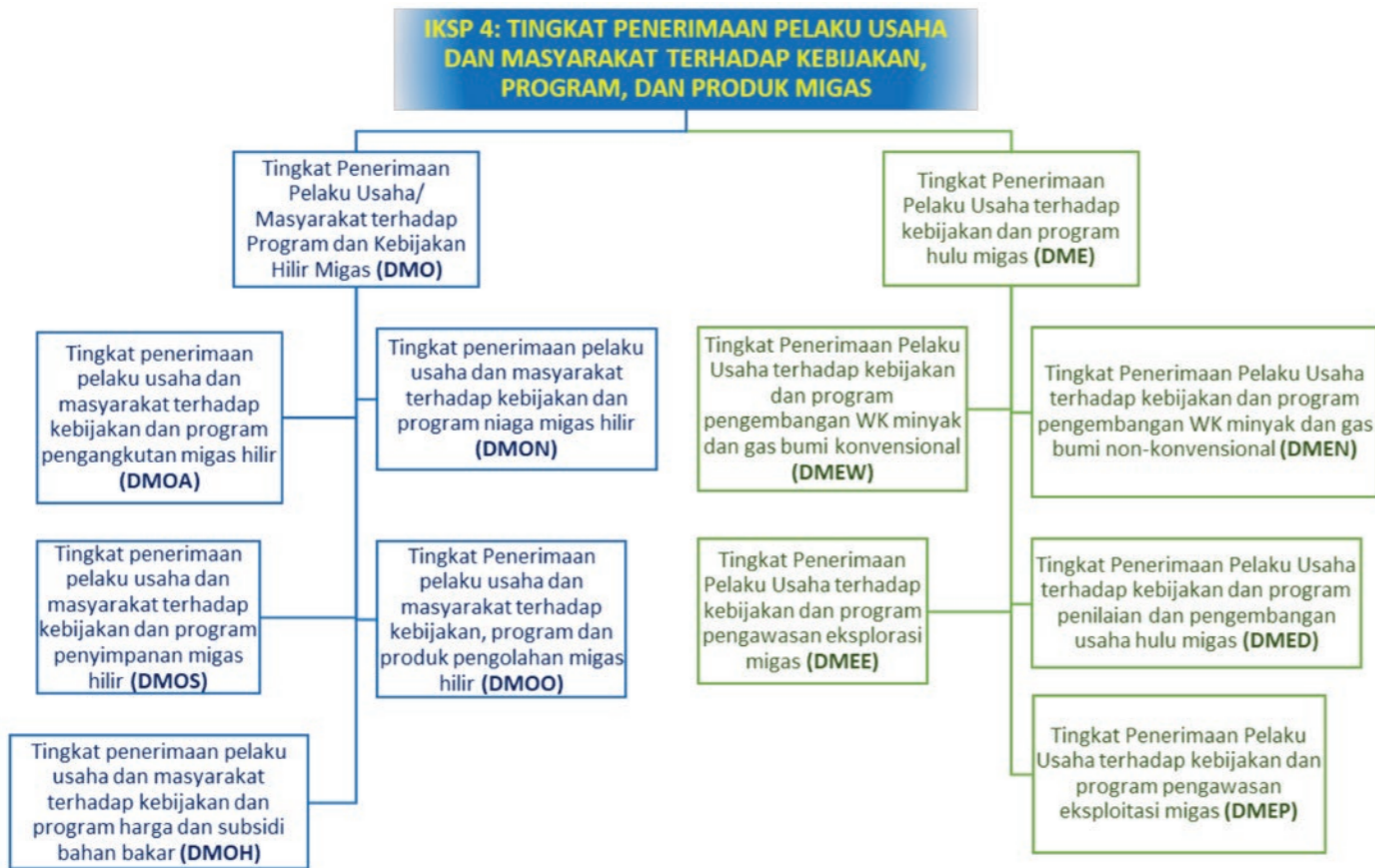


Bagan 3. Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas

### 3.4 TINGKAT PENERIMAAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PRODUK MIGAS

Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kebijakan, Program, dan Produk Migas merupakan indikator untuk mengukur Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap kebijakan, program dan produk migas. Indikator ini menunjukkan seberapa besar penerimaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap hasil kebijakan, program, dan produk migas sehingga semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan. Tingkat penerimaan ini merupakan suatu faktor yang mendorong atau menghambat penerapan program yang dibuat oleh Pemerintah

Indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO). Indikator ini memiliki sasaran terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :

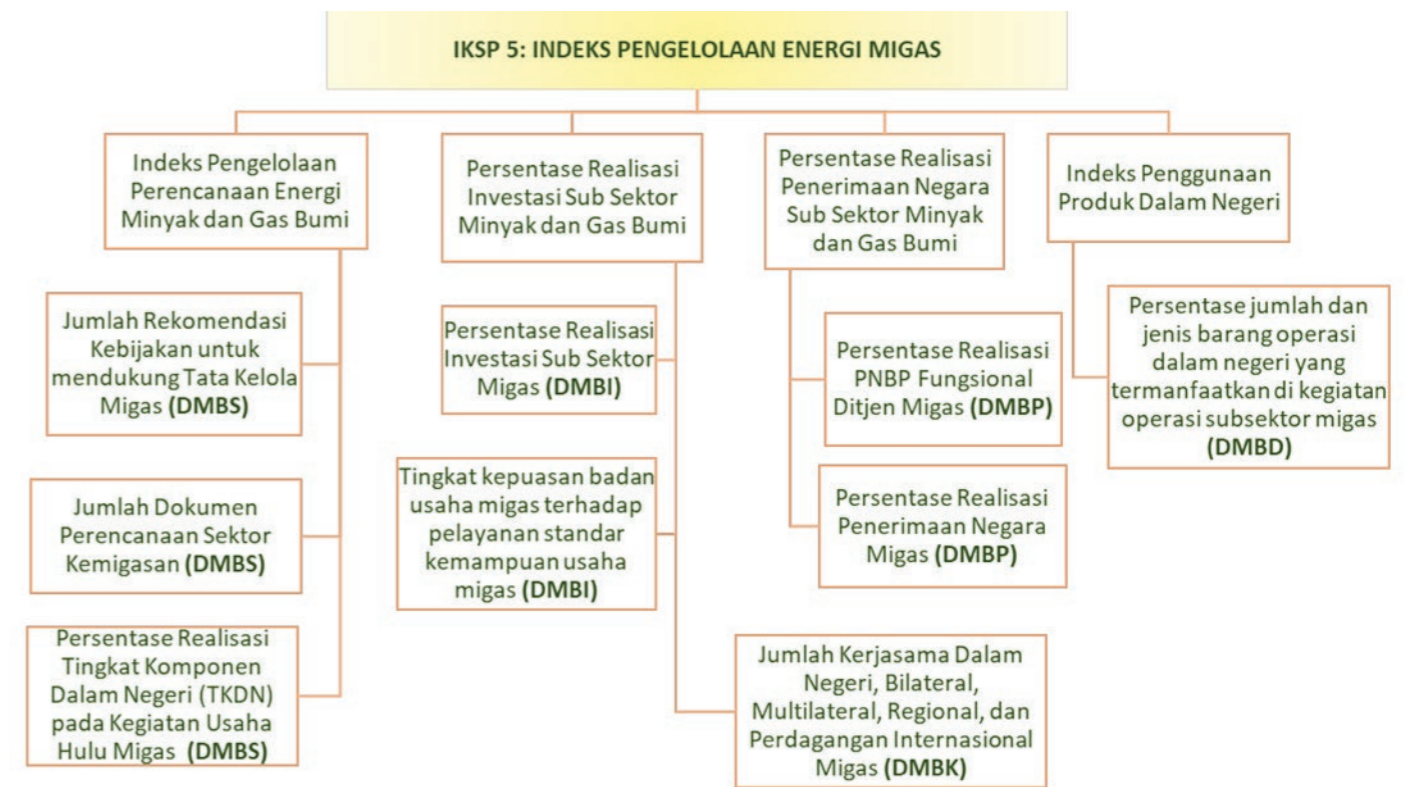


Bagan 4. Indikator Pendukung Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kebijakan, Program, dan Produk Migas

### 3.5 INDEKS PENGELOLAAN ENERGI MIGAS

Indeks Pengelolaan Energi Migas adalah indeks yang menunjukkan pengelolaan migas agar dapat dipergunakan secara optimal, dapat digunakan secara efisien baik dalam konsumsi maupun produksi sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Indeks Pengelolaan Energi Migas berada pada

Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB). Indeks Pengelolaan Energi Migas memiliki sasaran Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi. Indikator ini ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana Bagan 5 berikut :



Bagan 5. Indikator Pendukung Indeks Pengelolaan Energi Migas

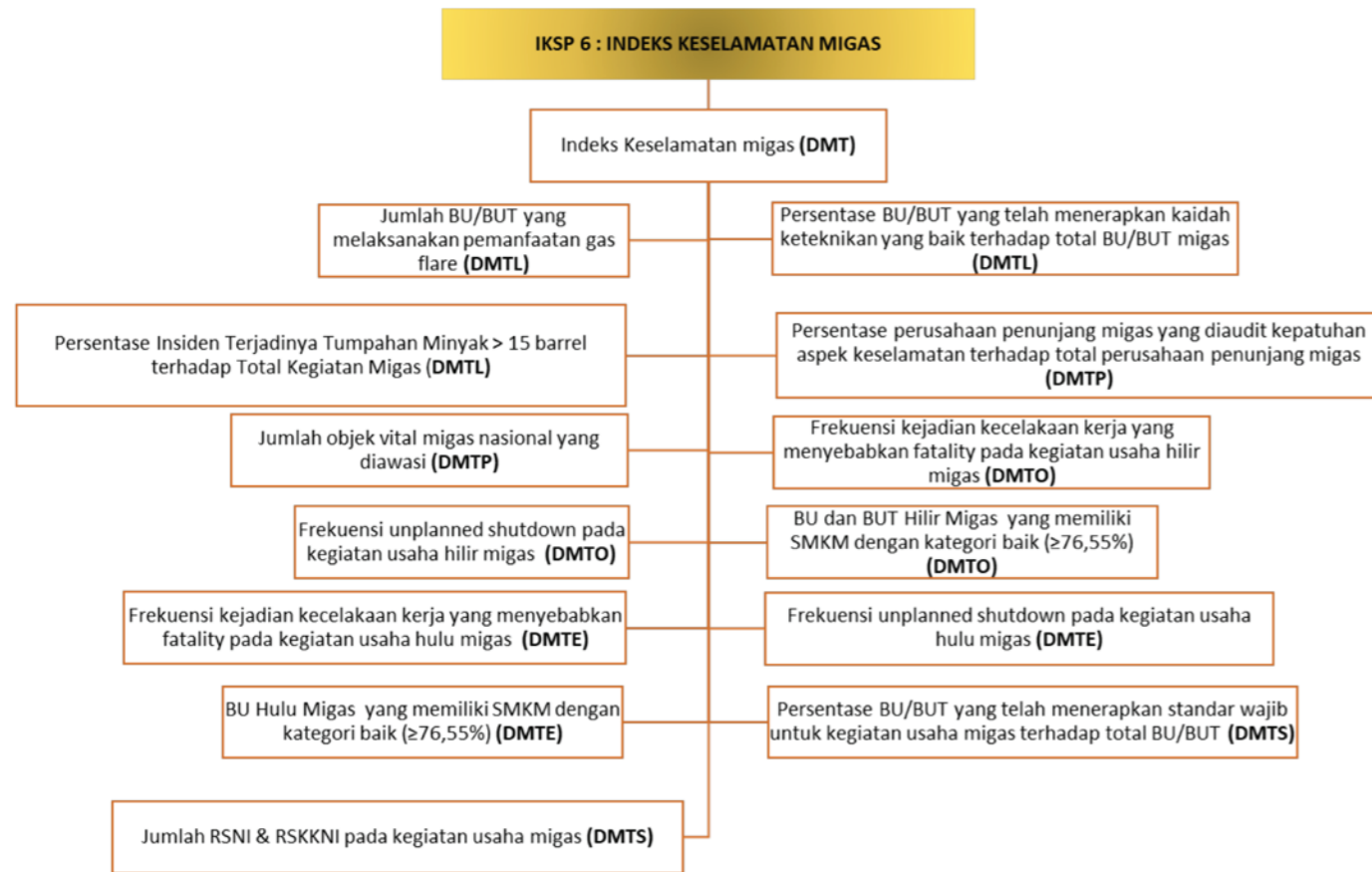
### 3.6 INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan Migas adalah indeks yang menunjukkan tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan Migas baik di hulu maupun di hilir melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu dan hilir Migas. Dalam hal ini Pemerintah terus mendorong usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Indeks Keselamatan Migas berada pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (DMT). Indeks Keselamatan Migas memiliki sasaran terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan

ramah lingkungan. Indikator ini ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana Bagan 6 berikut :

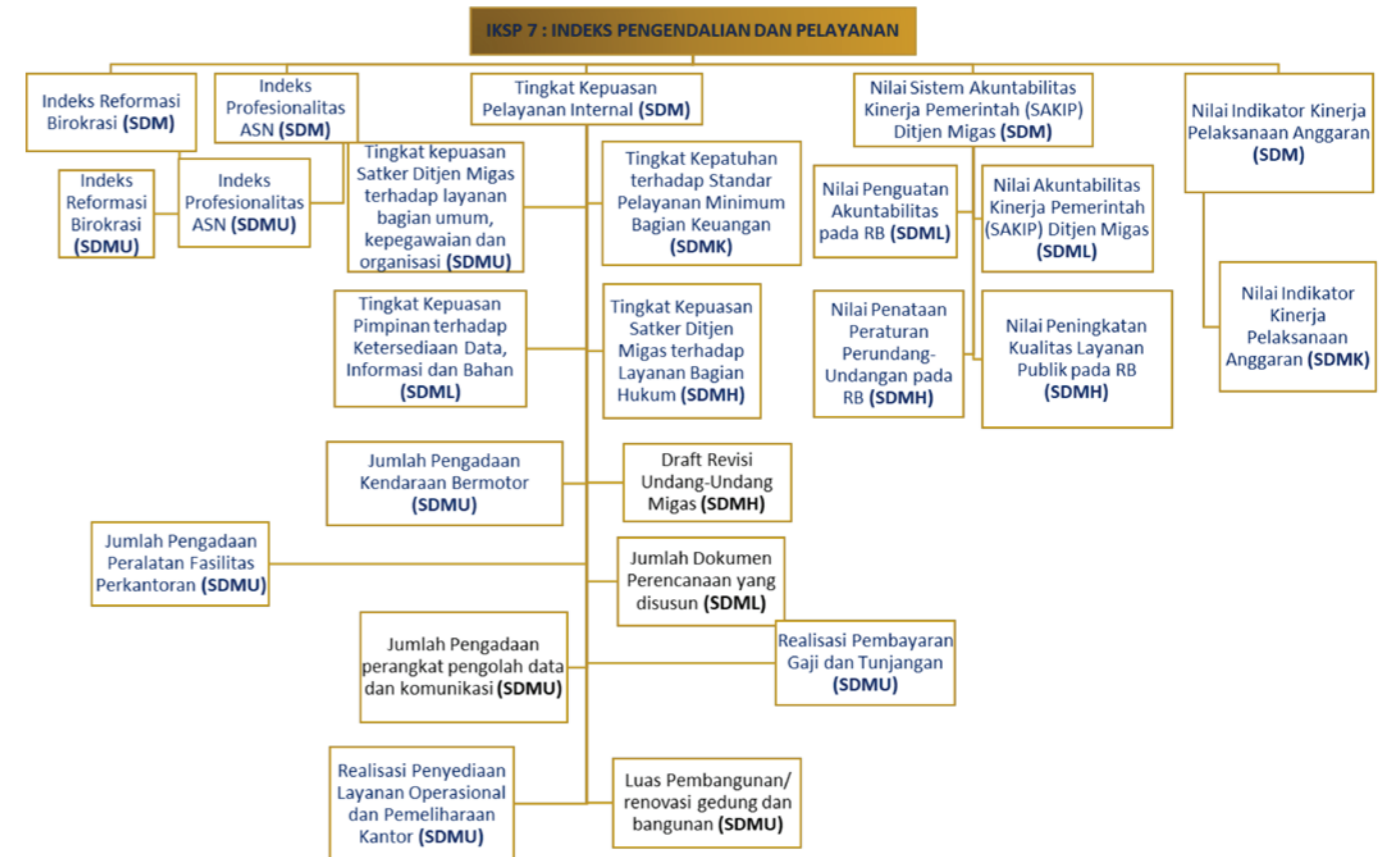


Bagan 6. Indikator Pendukung Indeks Keselamatan Migas

### 3.7 INDEKS PENGENDALIAN DAN PELAYANAN

Indeks Pengendalian dan Pelayanan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan bagi internal maupun layanan publik.

Indeks pengendalian dan pelayanan menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas yang ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :



Bagan 7. Indikator Pendukung Indeks Pengendalian dan Pelayanan





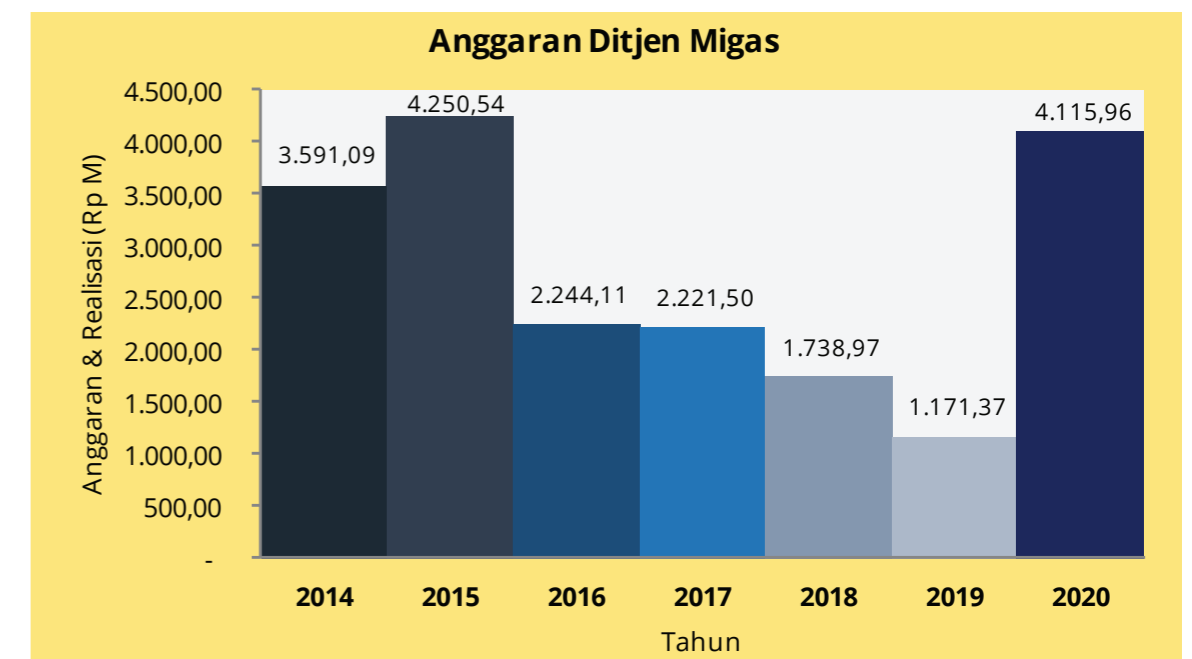
## 4 ANGGARAN DITJEN MIGAS

RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2020**

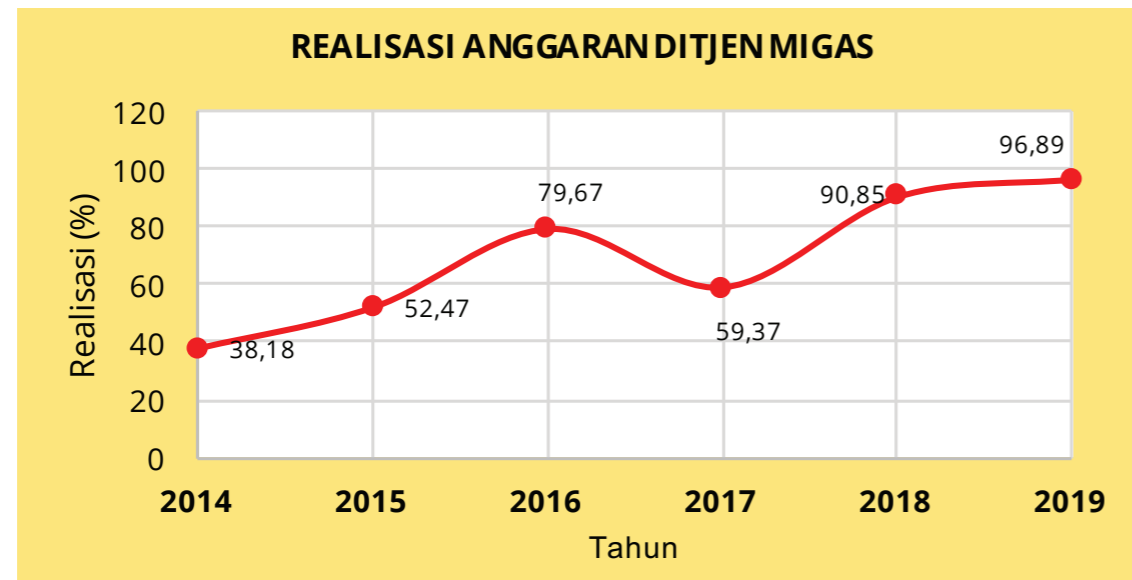
Dalam rangka pencapaian bertujuan negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pendekatan pengelolaan anggaran yang saat ini berlaku adalah pengelolaan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*) yang berfokus pada sasaran, *outcomes*, dan *output* sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini akan memberikan informasi kinerja atas program/

kegiatan pada suatu K/L serta dampaknya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan tetapi keterkaitan hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (*top down*) dan pelaksanaan kebijakan (*bottom up*). Dalam rangka melakukan penyusunan anggaran di tahun 2019, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggunakan pendekatan penganggaran dengan kebijakan *money follows program*. Alokasi anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019. Oleh karena itu, saat ini Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu tiap tahun sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



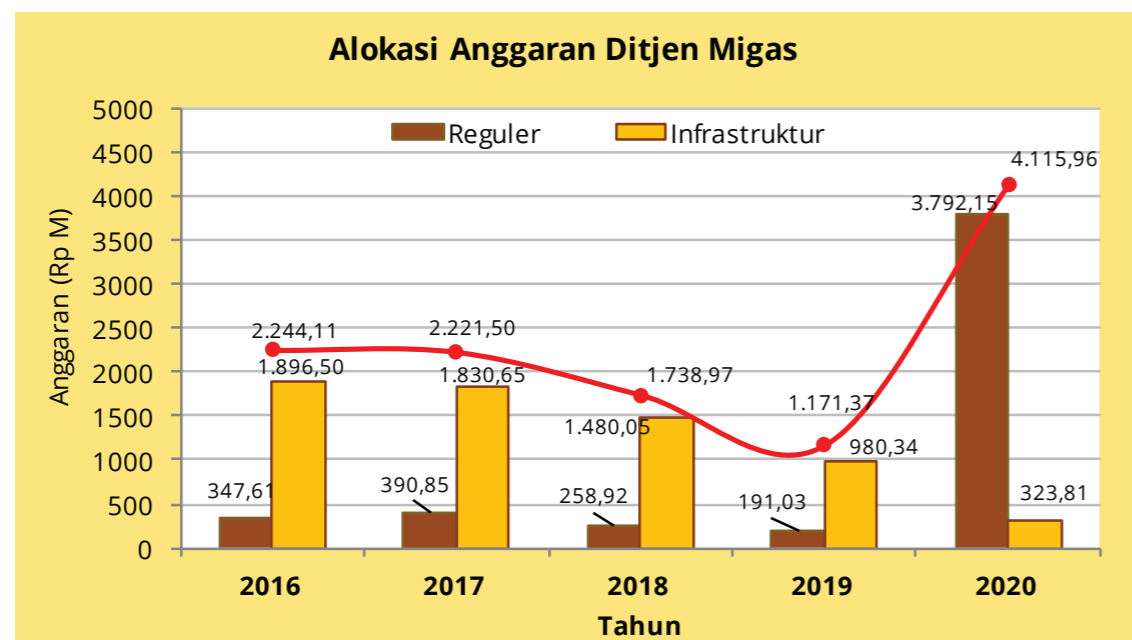
Grafik 23. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2019



Grafik 24. Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2014-2019

Untuk realisasi anggaran tiap tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 seperti terlihat pada grafik di atas. Sampai dengan akhir Desember 2019 realisasi mencapai lebih dari 96 % atau sebesar Rp 1.090.869.367.641,-. Tahun 2020 alokasi anggaran

Ditjen Migas sebesar Rp 4.115.960.589.000 yang diperuntukkan untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 3.792.150.491.000 dan belanja reguler sebesar Rp 323.810.098.000,- sebagaimana terlihat pada grafik berikut



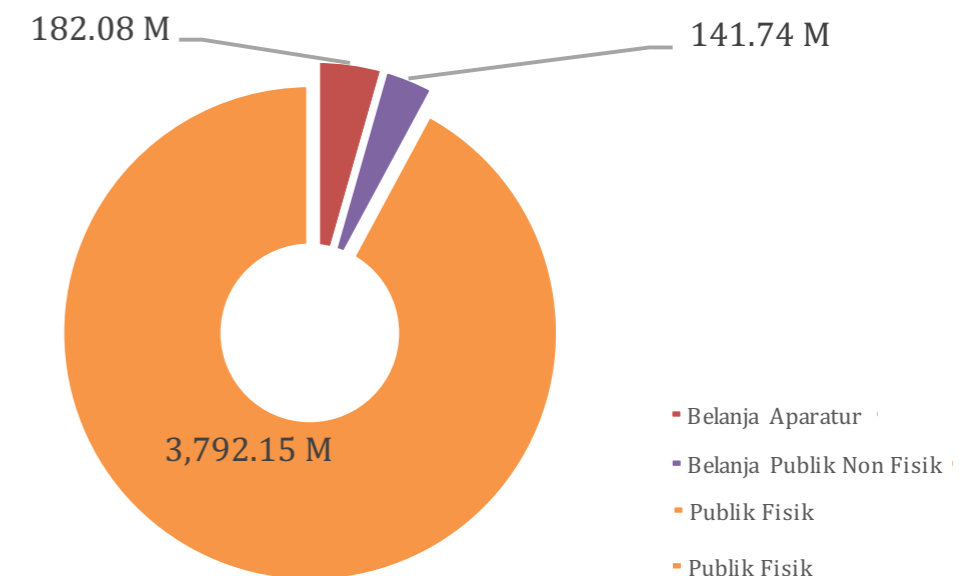
Grafik 25. Alokasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2020

Alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2020 terbagi berdasarkan penerima manfaatnya yaitu

1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pembayaran gaji dan Operasional perkantoran
2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan

3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit Nelayan, Konversi Minyak Tanah ke LPG, Rivi FEED/DEDC Jargas, dan Layanan Infrastruktur

Untuk masing-masing alokasi dapat dilihat pada grafik 24 dengan besaran belanja aparatur Rp 182.08 M, Belanja Publik Non Fisik Rp 141,74 M, dan Belanja Publik Fisik sebesar Rp 3.792,15 M



Grafik 26. Belanja Anggaran TA 2020

Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

NO	UNIT	Jumlah (Rp Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	26.706.997
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	83.969.936
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	13.240.632
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	17.810.388
5	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	182.082.145
6	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infastruktur (DMI)	3.792.150.491
<b>TOTAL</b>		<b>4.115.960.589</b>

Tabel 6. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2



## 5 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2020**

Pencapaian misi/sasaran K/L (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam K/L, dan Pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang telah

ditetapkan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan yang berada di level Eselon II. Sedangkan Indikator Kinerja *Output* berada di level Eselon III

### 5.1 IKK DAN IKO DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM

Direktorat Pembinaan Program memiliki sasaran kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Program Kemigasan yang Efektif, yang capaiannya diukur dengan menggunakan 4 indeks, yaitu indeks pengelolaan energi minyak dan gas bumi, Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi, Persentase Realisasi Penerimaan Negara Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Indeks Penggunaan Produk Dalam Negeri, adapun setiap indeks merupakan komposit dari *output* pada unit-unit eselon III.

**1. Indeks Pengelolaan Perencanaan Energi Migas,** Indikator yang menunjukkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung tata kelola migas serta dokumen perencanaan sektor kemigasan

**2. Indeks Realisasi Investasi subsektor migas,** Indikator yang menunjukkan persentase realisasi investasi subsektor migas + jumlah kerjasama dalam negeri, bilateral, multilateral, regional, dan perdagangan internasional migas

**3. Persentase realisasi penerimaan negara migas,** Indikator yang menunjukkan Persentase realisasi PNBP fungsional ditjen migas dan persentase realisasi penerimaan negara migas terhadap target

**4. Indeks Penggunaan Produk dalam negeri,** Indikator yang menunjukkan persentase nilai barang operasi substitusi impor menjadi produk dalam negeri + tingkat kepuasan BU Migas terhadap pelayanan standard kemampuan usaha migas + persentase realisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu migas

#### 5.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DMB

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Terwujudnya Pengelolaan Program Kemigasan yang Efektif	1	Indeks Pengelolaan Perencanaan Energi Minyak dan Gas Bumi	1	Indeks
	2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	100	%
	3	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	100	%
	4	Indeks Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	Indeks

## 5.1.2 Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 8. IKO Sub Direktorat di DMB

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN
Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Barang Operasi Migas	1	Persentase jumlah dan jenis barang operasi dalam negeri yang termanfaatkan di kegiatan operasi subsektor migas	2,51	%
Layanan Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	2	Persentase Realisasi PNBP Fungsional Ditjen Migas	100	%
	3	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	100	%
Layanan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	4	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional Migas	20	Jumlah Kerjasama
Layanan Pembinaan dan Pengembangan Investasi Migas	5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	100	%
	6	Tingkat kepuasan badan usaha migas terhadap pelayanan standar kemampuan usaha migas	77	%
Layanan Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk mendukung Tata Kelola Migas	2	Rekomendasi
	8	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas	2	Dokumen
	9	Persentase Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	60	%

5.1 IKK DAN IKO  
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR (DMO)

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir memiliki 4 sasaran kegiatan, yaitu Tersedianya Pasokan Hilir Migas Sesuai Kebutuhan, Terjaminnya Pasokan hilir migas yang berkelanjutan, Terjangkaunya Harga Migas Hilir, dan Tersedianya Fasilitas Pendistribusian Migas sesuai Kebutuhan. Capaian dari sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan 10 indeks, yang disusun berdasarkan komposit dari *output* pada unit-unit eselon III.

- 1. Indeks Ketersediaan BBM**, Indikator yang mengukur ketersediaan BBM (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.
- 2. Indeks Ketersediaan LPG**, Indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*)

terhadap kebutuhan dalam, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas

- 3. Indeks Ketersediaan LNG**, Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisi neraca migas.
- 4. Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM**, Volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional, sebagai jaminan ketersediaan BBM dalam rangka meningkatkan ketahanan BBM nasional.

- 5. Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG**, Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *major force* yang menyebabkan kelangkaan LPG, berfungsi sebagai informasi mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.
- 6. Indeks Keterjangkauan Harga Hilir Migas**, Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas.
- 7. Indeks Fasilitas Niaga Migas**, Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG, berfungsi, untuk mengetahui kapasitas fasilitas niaga migas nasional yang tersedia dalam mendistribusikan BBM, gas pipa, CNG, LNG dan LPG
- 8. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas**, Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan

BBM, LNG dan LPG nasional. Meningkatkan kualitas perencanaan formulasi harga migas sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Ditjen Migas. Analisis terkait *willingness to pay*, kemampuan fiskal negara telah dipertimbangkan selama proses penyusunan formula harga migas. Kriteria Harga Migas yang Ideal ialah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

- 9. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas**, Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG, digunakan untuk mengetahui kapasitas fasilitas pengangkutan migas nasional yang tersedia dalam mendistribusikan BBM, gas pipa, CNG, LNG dan LPG
- 10. Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha/ Masyarakat terhadap Program dan Kebijakan Hilir Migas**, Indikator untuk mengukur Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Migas Hilir Migas

## 5.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DMO

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Tersedianya Pasokan Hilir Migas Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan BBM	1	Indeks
	2	Indeks Ketersediaan LPG	1	Indeks
	3	Indeks Ketersediaan LNG	1	Indeks
Terjaminnya Pasokan hilir migas yang berkelanjutan	4	Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM	23	Hari
	5	Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG	7	Hari
Terjangkaunya Harga Migas Hilir	6	Indeks Keterjangkauan Harga Hilir Migas	1	Indeks
	7	Indeks Fasilitas Niaga Migas	100	
Tersedianya Fasilitas Pendistribusian Migas sesuai Kebutuhan	8	Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	50	%
	9	Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	100	%
	10	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha/ Masyarakat terhadap Program dan Kebijakan Hilir Migas	70	%

## 5.2.2 Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 10. IKO Sub Direktorat di DMO

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN	
Layanan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	1	Tingkat penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengangkutan migas hilir	70	%	
	2	Kapasitas pengangkutan minyak bumi	500	KL	
	3	Kapasitas Pengangkutan LPG, LNG, CNG, dan Gas Bumi Melalui Pipa	100	MTon	
Layanan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Niaga Migas	4	Deviasi Kuantitas impor BBM dari kuantitas yang direkomendasikan	30	%	
	5	Deviasi kuantitas impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	20	%	
	6	Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	30	%	
	7	Deviasi kuantitas ekspor LNG pola hilir (trading) dari kuantitas yang direkomendasikan	15	%	
	8	Tingkat penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan dan program niaga migas hilir	70	%	
	9	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	397	Ton	
	10	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	804	Ton/d	
	11	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	35	MMSCFD	
	12	Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	119	MMSCFD	
	13	Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	6.496,84	Km	
	14	Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	764.347	KL	
	Layanan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	15	Jumlah Cadangan BBM Operasional	23	Hari
		16	Jumlah Cadangan LPG Operasional	7	Hari
		17	Kapasitas penyimpanan minyak bumi dan hasil olahan	7.039.678	KL
18		Kapasitas Penyimpanan LNG	835.626	m3	
19		Kapasitas Penyimpanan LPG	522.457	Ton	
20		Kapasitas Penyimpanan CNG	1.005.780	m3	
21		Tingkat penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan dan program penyimpanan migas hilir	70	%	

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN
Layanan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	22	Produksi BBM dan Hasil Olahan	723.287	BOPD
	23	Produksi LPG	2,03	MTPA
	24	Produksi LNG	19,15	MTPA
	25	Kapasitas Terpasang Infrastruktur Pengolahan Minyak bumi dan Hasil Olahan	1.1791,10	Ribu BCPD
	26	Kapasitas Terpasang Kilang LPG	2,12	MTPA
	27	Kapasitas Terpasang Kilang LNG	44,09	MMTPA
	28	Deviasi Kuantitas Impor Feedstock Kilang yang Direkomendasikan	30	%
	29	Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan	11	%
	30	Tingkat Penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan, program dan produk pengolahan migas hilir	70	%
	Layanan Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	31	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga LPG yang disetujui oleh Direktur	100
32		Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM yang disetujui oleh Direktur	100	%
33		Tingkat penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan dan program harga dan subsidi bahan bakar	70	%
34		Deviasi Harga BBM	5	%
35		Deviasi Harga LPG	10	%
36		Persentase Realisasi Volume LPG Tertentu (Subsidi dan Non-Subsidi)	100	%
Layanan Perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP	37	Layanan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Grass Root dan RDMP	1	EPC
Layanan Verifikasi dan pengawasan Implementasi Mandatori pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga	38	Layanan Verifikasi dan Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	1	Rekomendasi

### 5.3 IKK DAN IKO DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu memiliki 4 sasaran kegiatan, yaitu Tersedianya Pasokan Hilir Migas Sesuai Kebutuhan, Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan, Terjangkaunya Harga Gas Hulu dan LNG Pola Hulu, dan Tersedianya Fasilitas Pendistribusian Migas sesuai Kebutuhan. Capaian dari sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan 5 indeks, yang disusun berdasarkan komposit dari output pada unit-unit eselon III.

- 1. Indeks Ketersediaan Hulu Migas** = Indikator untuk mengukur ketersediaan hulu migas (minyak dan gas bumi) terhadap kebutuhan dalam negeri
- 2. Reserve to Production Ratio Minyak Bumi**, Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan minyak komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun

**3. Reserve to Production Ratio Gas Bumi**, Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan gas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun

**4. Indeks Persepsi Pelaku Usaha terhadap Harga Gas Hulu dan LNG pola hulu**, Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga gas pipa skema hulu, LNG skema hulu, LPG skema hulu dan gas suar yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas.

**5. Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kebijakan, Program, dan Produk Hulu Migas**, Indikator untuk mengukur Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Migas Hilir Migas.

#### 5.3.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DME

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Tersedianya Pasokan Hulu Migas sesuai kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1	Indeks
Tersedianya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan	2	Reserve to Production Ratio (R/P) Minyak Bumi	8,58	Tahun
	3	Reserve to Production Ratio (R/P) Gas Bumi	20,35	Tahun
Terjangkaunya Harga Gas Hulu dan LNG pola hulu	4	Indeks Persepsi Pelaku Usaha terhadap Harga Gas Hulu dan LNG pola hulu	1	Indeks
Meningkatnya Dukungan Pelaku Usaha terhadap Kebijakan dan Program Hulu Migas	5	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program hulu migas	100	%

### 5.3.2 Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 12. IKO Sub Direktorat di DME

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN
Layanan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Penetapan Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional	1	Persentase WK Migas konvensional yang diminati terhadap jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan	60	%
	2	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program pengembangan WK minyak dan gas bumi konvensional	70	%
Layanan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan Penetapan Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional	3	Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	50	%
	4	Deviasi Penetapan Harga Gas Hulu dan LNG	0	%
	5	Pemanfaatan Alokasi Gas Domestik	62	%
	6	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program pengembangan WK minyak dan gas bumi non-konvensional	70	%
Layanan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas	7	Jumlah Sumberdaya Migas di Wilayah kerja Eksplorasi	70	BBOE
	8	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program pengawasan eksplorasi migas	70	%
Layanan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Migas	9	Jumlah Rekomendasi Plan of Development I (POD I) yang disetujui oleh Dirjen	2	POD
	10	Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kelola	2	WK
	11	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program penilaian dan pengembangan usaha hulu migas	70	%
Layanan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kegiatan Eksploitasi Migas	12	Produksi Minyak Bumi	707.276	BOPD
	13	Produksi Gas Bumi	1.129.445	BOEPD
	14	Cadangan minyak bumi	2.215	MMSTB
	15	Cadangan Gas Bumi	47,5	TCF
	16	Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang direkomendasikan	0	%
	17	Deviasi kuantitas ekspor LNG pola hulu dari kuantitas yang direkomendasikan	15	%
18	Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program pengawasan eksploitasi migas	70	%	
WK Migas Konvensional yang Ditawarkan	19	WK Migas Konvensional yang Ditawarkan	10	WK
WK Migas Non Konvensional yang Ditawarkan	20	WK Migas Non Konvensional yang Ditawarkan	2	WK

#### 5.4 IKK DAN IKO DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN (DMT)

Direktorat Teknik dan Lingkungan mempunyai 1 Sasaran Kegiatan yaitu Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Capaian dari sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indeks Keselamatan Migas, yang disusun berdasarkan komposit dari *output* pada unit-unit eselon III.

##### 5.4.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DMT

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	1	Indeks Keselamatan migas	0,88	Indeks



#### 5.4.2 Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 14. IKo Sub Direktorat di DMT

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Layanan Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi	1	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total BU/BUT Migas	2,73	%
	2	Persentase Insiden Terjadinya Tumpahan Minyak lebih besar 15 barrel terhadap Total Kegiatan Migas	0,55	%
	3	Jumlah BU/BUT yang melaksanakan pemanfaatan gas flare	40	Perusahaan
Layanan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	4	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	4	%
	5	Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	35	Obyek/Tahun
Layanan Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	6	Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality pada kegiatan usaha hilir migas	4	%
	7	Frekuensi unplanned shutdown pada kegiatan usaha hilir migas	4	%
	8	BU dan BUT Hilir Migas yang memiliki SMK M dengan kategori baik (lebih besar sama dengan 76,55%)	12	BU/BUT
Layanan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	9	Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality pada kegiatan usaha hulu migas	4	%
	10	Frekuensi unplanned shutdown pada kegiatan usaha hulu migas	4	%
	11	BU Hulu Migas yang memiliki SMK M dengan kategori baik (lebih besar sama dengan 76,55%)	4	BU
Layanan Penyediaan RSNi dan RSKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas	12	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	10	%
	13	Jumlah RSNi dan RSKKNI pada kegiatan usaha migas	6	RSNi & RSKKNI

## 5.5 IKK DAN IKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL (SDM)

Sekretariat Ditjen Migas mempunyai 3 Sasaran Kegiatan yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Sikap Profesionalitas ASN, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas, Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien. Capaian dari sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan 5 Indeks yang disusun berdasarkan komposit dari *output* pada unit-unit eselon III.

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi :** Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
- 2. Indeks Profesionalitas ASN,** Indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Ditjen Migas.

### 5.5.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SDM

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Sikap Profesionalitas ASN	1	Indeks Reformasi Birokrasi	0,80	Indeks
	2	Indeks Profesionalitas ASN	0,80	Indeks
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	3	Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	76	%
Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	84	Nilai
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Nilai

- 3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal :** Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan internal (pegawai) dalam memperoleh layanan fungsi kesekretariatan.
- 4. Nilai SAKIP Ditjen Migas,** Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik
- 5. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran),** Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

### 5.5.2 Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 16. IKO Masing-Masing Bagian di SDM

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN
Draft Revisi Undang-Undang Migas	1	Draft Revisi Undang-Undang Migas	1	Draft
	2	Indeks Reformasi Birokrasi	0,8	Indeks
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	3	Indeks Profesionalitas ASN	0,8	Indeks
	4	Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi	76	%
	5	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan	100	%
	6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Nilai
	7	Tingkat Kepuasan Pimpinan terhadap Keterseediaan Data, Informasi dan Bahan	82	%
	8	Nilai Penguatan Akuntabilitas pada RB	6	Nilai
	9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	84	Nilai
	10	Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada RB	5	Nilai
	11	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB	6	Nilai
	12	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Bagian Hukum	80	%
	13	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	Dokumen
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	2	Unit
	15	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	8	Unit
	16	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	100	Unit
	17	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1.150	m2
Layanan Perkantoran	18	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%	100	%
	19	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	100	%

## 5.6 IKK DAN IKO DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DMI)

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas mempunyai 6 Sasaran Kegiatan yaitu Tercapainya Program Pemerintah Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi menggunakan APBN, Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Terlaksananya Pembagian Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan, Terlaksananya Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 3 Kg, Terlaksananya Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas, Terlaksananya Pembagian Konverter Kit ke Petani. Capaian dari sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan 5 Indikator yang disusun berdasarkan komposit dari output pada unit-unit eselon III :

- 1. Persentase capaian konversi BBM ke LPG**, Indikator yang menggambarkan pemenuhan target konversi BBM ke BBG oleh Pemerintah kepada Nelayan dan Petani
- 2. Indeks Sambungan Rumah Tangga**, Indikator yang menggambarkan jumlah jargas yang terbangun terhadap roadmap pembangunan jargas

### 5.6.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DMI

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Tercapainya Program Pemerintah Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi menggunakan APBN	1	Persentase capaian konversi BBM ke LPG	100	%
	2	Indeks Sambungan Rumah Tangga	1	Indeks
Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	3	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	266.070	SR
Terlaksananya Pembagian Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	4	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	40.000	Paket
Terlaksananya Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 3 Kg	5	Konversi Minyak Tanah Ke Tabung LPG 3 Kg	522.616	Paket
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas	6	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas	7	Layanan
Terlaksananya Pembagian Konverter Kit ke Petani	7	01-Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	10.000	Paket

### 5.6.2. Indikator Kinerja Output (IKO)

Tabel 18. IKO Sub Direktorat di DMI

OUTPUT KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET 2020	SATUAN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1	Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas	100	%
	2	Persentase pengadaan jaringan gas yang berhasil terhadap total pengadaan jaringan gas yang dilakukan	100	%
	3	Fasilitasi Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga menggunakan skema non-APBN	1	Dokumen
	4	Persentase Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dengan skema pembiayaan APBN terhadap Dokumen Pengadaan (kontrak)	100	%
	5	Persentase kesesuaian jumlah dan kualitas jaringan gas yang dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan	100	%
	6	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	266.070	SR
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	7	Persentase Realisasi Jumlah Penerima Konverter Kit BBG terhadap Roadmap Konversi BBM ke BBG	100	%
	8	Persentase Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit terhadap Roadmap Konversi BBM ke BBG	100	%
	9	Terkonversinya Bahan Bakar gas untuk Nelayan	40.000	Paket
Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	10	Persentase Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro	100	%
	11	Jumlah konversi Mitan ke LPG tabung 3 Kg	522.616	Paket
Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas	12	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas	7	Layanan
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	13	Persentase Realisasi Jumlah Penerima Konverter Kit BBG terhadap Roadmap Konversi BBM ke BBG	100	%
	14	Persentase Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit terhadap Roadmap Konversi BBM ke BBG	100	%
	15	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	10.000	Paket
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	16	Dokumen Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	8	Dokumen



## 6 RENCANA AKSI

RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenpanRB menerapkan pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP untuk instansi pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah dan berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM bahwa Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan Ditjen Migas untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi yang dapat memantau Rencana Aksi maupun capaian Perjanjian Kinerja (PK) secara berkala. Rencana Aksi tersebut akan memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan yang mencantumkan sub kegiatan/sub komponen rinci dalam upaya mewujudkan target kinerja. Rencana aksi memuat rencana-rencana yang akan dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan, atau per semester dengan

begitu target suatu kinerja dapat terpantau dengan baik pada saat evaluasi. Isi rencana aksi atas kinerja Direktorat Jenderal Migas lebih lengkap dapat diakses di aplikasi SIMERAK melalui *website* <http://simerak.migas.esdm.go.id>. Pengguna aplikasi khususnya pengguna eselon III diwajibkan mengisi Rencana Aksi per sub kegiatan/sub komponen setiap bulannya, disertai dengan pengisian jumlah target data dukung yang akan disampaikan pada waktu akan dilakukan penilaian oleh evaluator pada akhir triwulan I, II, III dan IV. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja Ditjen Migas secara lebih baik kualitasnya pelaporannya, proses dokumentasinya dan juga peningkatan akses dan penyajian datanya. Berikut data yang termuat dalam format rencana aksi atas kinerja yaitu:

1. Sasaran Kegiatan
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3. Target
4. Komponen/Sub Komponen
5. Anggaran
6. Rencana Aksi (Januari-Desember)
7. Evaluasi setiap tiga bulan (triwulan)





**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**Ibnu Sutowo Building**

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910

Telepon : 021-5268910

Fax : 021-5205469

Email : [info@migas.esdm.go.id](mailto:info@migas.esdm.go.id)

Website : <http://migas.esdm.go.id/>



[www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)



[@halomigas](https://www.instagram.com/halomigas)



Halo Migas Ditjen Migas



[@halomigas](https://www.twitter.com/halomigas)

